

SKRIPSI

**DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PADA KINERJA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PADA KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PINRANG



OLEH

NIRMAYANI

NIM: 2220203862202065

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nirmayani

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202065

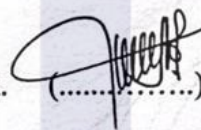
Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-2658/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.
NIP : 199202032025212009



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.D.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Nirmayani
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202065
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B-2658/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
Tanggal Kelulusan : 2 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Ayu Frihatni, S. E., M.Ak., CTA., ACPA (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota)

Ira Sahara, S.E., M.Ak (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.
NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Lawa dan Ibunda terkasih Baralliang serta saudari penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terimakasih atas segala jerih payah dalam membesarkan, mendidik, dan mengantarkan penulis hingga meraih gelar sarjana. Berkat dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan, penulis dapat menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, dukungan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha keras menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang jauh lebih baik dan maju, serta selaku Dosen Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.

4. Bapak penguji skripsi Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan Staf Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah C yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas setiap kenangan indah, setiap kebersamaan, setiap pelajaran hidup, serta setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Terimakasih atas semua dukungan, serta semangat yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Zulfa Utami, Besse Nurhawaissa, Reza Alya Metapia, Tita Rizky Aulia, St. Rahmah, yang senantiasa membawa keceriaan dan energi positif dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasih atas setiap dukungan, cerita, dan tawa yang mengiringi setiap fase perkuliahan ini.
9. Teman-teman KKN Desa Sereang, yaitu Salwa, Amel, Putri, Lisa, dan Winda, yang telah menemani dan memberikan banyak pengalaman suka duka, canda tawa, serta kenangan berharga selama pelaksanaan KKN. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis, Nurvadillah, Putri Ayu, Nasrah, dan Friska Hamdana, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tetap

bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, hambatan, serta rasa lelah yang kerap datang selama perjalanan ini. Terima kasih telah percaya pada kemampuan diri sendiri dan berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih karena tidak memilih menyerah dan tetap berusaha memberikan yang terbaik sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Atas perhatian dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, 8 Juli 2026
23 Muharram 1448 H

Penulis



NIRMAYANI
NIM. 2220203862202065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirmayani
NIM : 2220203862202065
Tempat, Tgl. Lahir : Bulu, 22 Mei 2003
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Juli 2026
Penyusun



NIRMAYANI
NIM. 2220203862202065

ABSTRAK

NIRMAYANI. *Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Andi Ayu Frihatni).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan efisiensi anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang, menganalisis dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta mengetahui penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran serta pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala bidang anggaran, kasubbag program, staf bidang anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, serta staf penelaah teknis kebijakan DPRD Kabupaten Pinrang sebagai informan eksternal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pengurangan belanja operasional yang kurang prioritas, penghematan penggunaan fasilitas kantor, pemanfaatan teknologi digital, penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA), serta penetapan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Penerapan efisiensi anggaran tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi karena kualitas pekerjaan dan pelayanan tetap dapat dipertahankan melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang meliputi amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, penyajian laporan keuangan yang akurat, serta pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Kinerja Pegawai, Kinerja Organisasi, Akuntansi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	12
C. Tinjauan Konseptual	37

D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan Penelitian.....	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS.....	XXV

DAFTAR TABEL

No Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Anggaran dan Realisasi Anggaran	3
4.1	Profil Informan Internal	55
4.2	Profil Informan Eksternal	55



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Tabel	Halaman
1	Surat Pedoman Wawancara	II
2	Surat Keterangan Pembimbing	V
3	Berita Acara Revisi Judul	VI
4	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	VII
5	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal	VIII
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	IX
7	Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pinrang	X
8	Dokumentasi Wawancara	XXIV
9	Biodata Penulis	XXV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / إ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ / أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوٌّ :*‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billah* دِينُ اللهِ *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

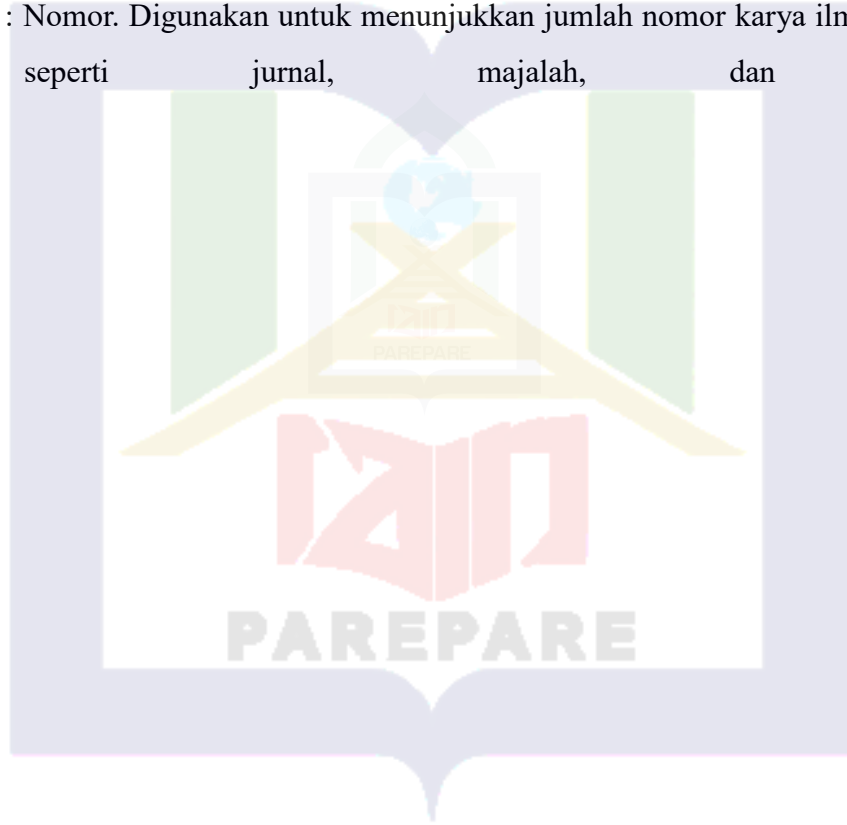
Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebaga.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat nyata melalui penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pendekatan *Value for Money* menekankan bahwa setiap penggunaan dana publik harus mampu menghasilkan output dan outcome optimal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sebagai pemilik dana publik.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan anggaran yang efisien semakin dipertegas melalui kebijakan nasional, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengarahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian belanja, mengurangi kegiatan yang kurang prioritas, serta memastikan penggunaan anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah menjadi agenda strategis nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh perangkat daerah, khususnya instansi pengelola keuangan daerah.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, penerapan kebijakan efisiensi anggaran menuntut perubahan pola pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan produktif. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan keterbatasan fiskal

dengan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat. Efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai upaya optimalisasi sumber daya organisasi melalui pengendalian belanja operasional, digitalisasi sistem administrasi keuangan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kondisi tersebut menempatkan organisasi pengelola keuangan daerah sebagai aktor strategis dalam memastikan kebijakan efisiensi dapat berjalan tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Selain pendekatan manajerial dan regulatif, pengelolaan keuangan publik juga dapat dipahami melalui perspektif nilai etika dan moral sebagaimana tercermin dalam prinsip akuntansi syariah. Menurut Iwan Triuwono, akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Prinsip keadilan menuntut distribusi anggaran yang proporsional sesuai kebutuhan publik, sedangkan prinsip kebenaran mengharuskan penyajian informasi keuangan secara jujur dan transparan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan efisiensi anggaran dalam sektor publik, yaitu memastikan penggunaan dana daerah dilakukan secara hemat, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan pelayanan masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah. Posisi tersebut menjadikan BKAD sebagai pusat pengendalian sistem keuangan pemerintah daerah sehingga keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran sangat bergantung pada kinerja organisasi ini. Setiap kebijakan pengendalian belanja, optimalisasi pendapatan, maupun penyesuaian program kegiatan secara langsung berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta kinerja organisasi BKAD.

Untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Pinrang, diperlukan informasi mengenai perkembangan anggaran dan realisasi keuangan daerah dalam beberapa periode anggaran. Data tersebut dapat memberikan indikasi awal mengenai dinamika pelaksanaan anggaran sekaligus menjadi dasar dalam melihat bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dijalankan pada tingkat perangkat daerah. Adapun kondisi anggaran dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Pinrang yang dikelola melalui BKAD disajikan pada tabel berikut.

Tabel.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)
TAHUN 2024				
Pendapatan Daerah	1. 466. 585. 877. 684	38. 141. 721. 722	1. 504. 727. 599. 406	1. 471. 097. 735. 127
Belanja Daerah	1. 501. 585. 877. 684	63. 509. 086. 354	1. 565. 094. 964. 038	1. 511. 435. 350. 084
Penerimaan Pembiayaan	35. 000. 000. 000	25. 367. 364. 632	60. 367. 364. 632	60. 367. 364. 632
TAHUN 2025				
Pendapatan Daerah	1. 494. 222. 777. 758	(6. 312. 653. 277)	1. 487. 910. 124. 481	1. 457. 890. 878. 942
Belanja Daerah	1. 543. 098. 395. 408	(35. 158. 521. 257)	1. 507. 939. 874. 151	1. 455. 711. 710. 258
Penerimaan Pembiayaan	48. 875. 617. 650	(28. 845. 867. 980)	20. 029. 749. 670	20. 036. 275. 227

Sumber: Laporan Tahunan 2024-2025 BKAD Pinrang

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai anggaran setelah perubahan baik pada pendapatan daerah maupun belanja daerah. Realisasi anggaran pada tahun tersebut juga relatif mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi penyesuaian anggaran dan

realisasi pada pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan pembiayaan. Realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah masih berada di bawah anggaran setelah perubahan, sehingga menunjukkan adanya selisih antara target dan realisasi anggaran. Perbedaan capaian antar periode ini menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi, perubahan prioritas pembangunan, maupun faktor administratif dalam pelaksanaan program kegiatan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan variasi hasil terkait hubungan efisiensi dengan kinerja keuangan. Penelitian oleh Habibi, Utami & Samanto menemukan bahwa efisiensi pada realisasi APBD Kota Surakarta belum optimal meskipun pendapatan terealisasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian kinerja keuangan.¹ Penelitian lain oleh Bili & Siswati mengungkapkan bahwa efisiensi dan efektivitas anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perangkat daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efisiensi dapat meningkatkan kinerja apabila implementasinya tepat.² Selanjutnya, Hotimah & Fattah dalam penelitiannya di Kota Palu menunjukkan bahwa efisiensi belanja operasi dan modal memiliki implikasi langsung terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang baik.³

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan efisiensi anggaran dan kinerja keuangan daerah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis kuantitatif berbasis capaian realisasi anggaran dan rasio keuangan. Kajian yang menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan dalam praktik organisasi serta bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan

¹ Habibi, Utami, and Samanto, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."

² Bili and Siswati, "Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022."

³ Hotimah and Fattah, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Kota Palu."

dirasakan oleh aparatur pelaksana masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh angka realisasi anggaran, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan di tingkat organisasi pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini tidak hanya menilai capaian keuangan secara administratif, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diimplementasikan serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kinerja organisasi dan aparatur pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan di BKAD Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang menurut persepsi dan pengalaman pegawai?
3. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan di BKAD Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis dan memahami dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang berdasarkan persepsi dan pengalaman pegawai.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah. Penelitian ini menambah pemahaman tentang bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pegawai dalam konteks pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi melalui pendekatan kualitatif, yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BKAD Kabupaten Pinrang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan kerja BKAD Kabupaten Pinrang, serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan organisasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pimpinan BKAD dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga dapat membantu instansi dalam memperbaiki komunikasi internal dan mekanisme partisipasi pegawai dalam proses perencanaan anggaran.

- b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk memperluas penelitian sejenis di bidang akuntansi sektor publik, efisiensi keuangan, serta kinerja organisasi pemerintahan. Dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, hasil penelitian ini dapat menjadi contoh

bagaimana pengalaman pegawai dan persepsi personal dapat dijadikan dasar dalam analisis kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong akademisi lain untuk meneliti isu-isu efisiensi dan kinerja dari perspektif sosial dan perilaku organisasi.

c. Bagi Penulis Sendiri

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam memahami proses pengelolaan anggaran di instansi pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran. Penulis juga memperoleh wawasan baru tentang hubungan antara efisiensi keuangan dan peningkatan kinerja organisasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkuat kompetensi akademik penulis dalam bidang akuntansi sektor publik dan menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat untuk diterapkan di dunia kerja nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat sejauh mana topik yang diteliti telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Bagian ini juga berfungsi sebagai pembanding sekaligus dasar pijakan bagi penelitian penulis, sehingga dapat terlihat persamaan, perbedaan, serta kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Simatupang, Mauliza, dan Mariana berjudul “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mampu mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya integrasi antara perencanaan dan pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami indikator kinerja, serta lemahnya koordinasi antarbagian yang menyebabkan kebijakan efisiensi belum berjalan secara optimal.⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa efisiensi anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Perbedaannya, penelitian Fitri dkk. berfokus pada evaluasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja melalui metode literature review, sedangkan

⁴ Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah.”

penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana efisiensi anggaran diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salman dan Ikbal berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau dari Aspek Ekonomi”. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan publik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik melalui pengurangan pemborosan, pengalokasian sumber daya yang lebih tepat, serta peningkatan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perencanaan anggaran yang didasarkan pada prinsip ekonomi berperan penting dalam mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai efisiensi anggaran sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

Perbedaannya, penelitian Salman dan Ikbal lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan efisiensi anggaran dari perspektif ekonomi secara umum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.

⁵ Salman and Ikbal, “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marsselia dan Fitriasi berjudul “Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi pegawai mengenai efisiensi anggaran terhadap kinerja individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai yang positif terhadap efisiensi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, disiplin, serta akuntabilitas kerja. Semakin baik pemahaman dan persepsi pegawai mengenai efisiensi anggaran, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.⁶

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja aparatur pemerintah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa pengelolaan anggaran yang efisien dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja dalam organisasi sektor publik.

Perbedaannya, penelitian Marsselia dan Fitriasi berfokus pada persepsi pegawai terhadap efisiensi anggaran sebagai faktor yang memengaruhi kinerja individu, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi efisiensi anggaran dalam organisasi dan dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan di BKAD Kabupaten Pinrang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin, Iksan, dan rekan-rekan berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Era Digital”. Penelitian ini membahas pengaruh digitalisasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran melalui proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, digitalisasi juga

⁶ Salsabil Marsselia, “Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.”

membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran sehingga mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Perbedaannya, penelitian Muslimin, Iksan, dan rekan-rekan berfokus pada penerapan digitalisasi dalam perencanaan anggaran pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang sebagai instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian penulis lebih menekankan pada praktik pelaksanaan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Ramdan berjudul “Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran, efisiensi anggaran, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang efisien mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai efisiensi anggaran sebagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-

⁷ Muslimin Et Al., “Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia Efficiency.”

⁸ Setiawan and Ramdan, “Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akun.”

sama menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara optimal.

Perbedaannya, penelitian Setiawan dan Ramdan berfokus pada pengaruh efisiensi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada gambaran pelaksanaan efisiensi anggaran dalam mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Value for Money* (VfM)

Value for Money (VfM) merupakan konsep manajemen sektor publik yang menekankan bahwa penggunaan anggaran pemerintah harus memberikan nilai, manfaat, dan hasil yang optimal bagi masyarakat. VfM tidak hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang digunakan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan anggaran tersebut dalam menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis.⁹ Dengan kata lain, VfM memastikan bahwa setiap rupiah uang publik yang dibelanjakan memberikan *value* atau manfaat yang sepadan, baik dalam bentuk peningkatan layanan publik, pencapaian tujuan organisasi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *Value for Money* tidak dicetuskan oleh satu tokoh tunggal, melainkan berkembang secara bertahap dalam literatur manajemen sektor publik dan keuangan global sejak dekade 1980-an, di mana publikasi akademis awal yang secara khusus membahasnya ditulis oleh R. Glendinning pada tahun 1988.¹⁰ Di Indonesia, konsep ini sangat populer dan teori pengukurannya

⁹ Silaban, Lismono, and Silaen, "Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemprov DKI Jakarta."

¹⁰ Andreas Wibowo, Erwin Sukandar, Bely Utarja, Eko Nur Surachman, "Panduan Analisis *Value For Money*."

banyak diadopsi dari buku-buku tata kelola keuangan sektor publik karya pakar akuntansi seperti Mardiasmo dan Mahmudi.¹¹

Konsep VfM berangkat dari prinsip dasar bahwa pemerintah, sebagai pengelola dana publik, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal. Hal ini berbeda dengan logika sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Dalam sektor publik, orientasinya adalah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga penggunaan anggaran harus benar-benar dipertanggungjawabkan.¹² Oleh karena itu, VfM menjadi pendekatan yang mengintegrasikan aspek pengendalian anggaran, perencanaan program, dan evaluasi kinerja agar penggunaan dana publik dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam praktiknya, penerapan *Value for Money* mencakup keseluruhan siklus anggaran: mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi dan pelaporan.¹³ Oleh karena itu, VfM dapat digunakan sebagai alat untuk menilai apakah suatu instansi pemerintah bekerja secara produktif, hemat, dan efektif dalam memenuhi mandat pelayanan publik. Pendekatan ini juga relevan untuk menilai efektivitas kebijakan efisiensi anggaran, karena VfM memberikan dasar untuk memahami apakah penghematan yang dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat atau justru menurunkan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, *Value for Money* dapat dipahami sebagai konsep yang mengintegrasikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam satu kerangka manajemen publik. VfM memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap penggunaan anggaran karena menghubungkan *input*, proses, *output*,

¹¹ Fitriyani Et Al., “Analisis Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa.”

¹² Al-Hakim and Harnovinsah, “Penerapan Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran.”

¹³ Djazari, “Value for Money Audit Untuk Menilai Kinerja Lembaga Sektor Publik.”

dan *outcome* secara simultan. Dengan demikian, teori ini sangat penting untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah, termasuk BKAD, yang bertugas mengelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel. VfM memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan benar-benar meningkatkan kinerja organisasi, memperbaiki layanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁴

Secara umum, VfM terdiri dari tiga pilar utama, ketiga unsur ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran sektor publik.¹⁵

a. Ekonomis (*Economy*)

Prinsip ekonomi menekankan pentingnya melakukan pengadaan atau pembelian secara hemat tanpa menurunkan mutu. Dalam sektor publik, penghematan bukan berarti menekan biaya secara ekstrem, tetapi memastikan bahwa harga yang dibayar sepadan dengan kualitas barang atau jasa yang diterima. Misalnya, dalam proses pengadaan peralatan teknologi untuk pelaporan keuangan daerah, pemerintah harus memastikan bahwa pembelian dilakukan melalui mekanisme paling hemat seperti *e-purchasing* atau *e-catalog* yang telah diatur dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).¹⁶

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output. Efisiensi tercapai apabila pemerintah mampu menghasilkan output maksimal dengan sumber daya minimal, atau mencapai hasil tertentu dengan biaya serendah mungkin. Dalam pengelolaan anggaran daerah, efisiensi diukur dari

¹⁴ Suridiyanti et al., “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money.”

¹⁵ Ridwan and Anggrawati, “Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur.”

¹⁶ Irfansyah Ahmad, “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Pendekatan Value For Money.”

kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasinya. Tingginya efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan program dengan hemat, tanpa pemborosan, serta tetap menghasilkan output yang direncanakan. Efisiensi menjadi inti dari teori VfM dan paling relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Misalnya, penggunaan aplikasi sistem digital seperti SIPD-RI atau SIMDA Keuangan dapat mempercepat penyusunan laporan, meminimalkan human error, dan mengurangi biaya operasional sehingga organisasi menjadi lebih efisien.

c. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas menilai sejauh mana output dapat mencapai tujuan atau target yang ditetapkan. Efektivitas tidak hanya melihat jumlah anggaran yang diserap, tetapi menilai keberhasilan capaian program. Suatu kegiatan dapat efisien tetapi tidak efektif apabila output tercapai tetapi tujuan strategis tidak terpenuhi. Contohnya, BKAD bisa saja menekan biaya operasional, tetapi jika pelaporan keuangan terlambat atau kualitasnya menurun, maka anggaran tersebut tidak efektif.¹⁸ Oleh karena itu, efektivitas menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas kinerja.

2. Dampak (*Impact Theory*)

Teori dampak merupakan konsep penting dalam kajian administrasi publik, manajemen sektor publik, serta evaluasi kebijakan pemerintah. Dampak merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan suatu program, tindakan organisasi, maupun penerapan sistem tertentu. Dalam konteks organisasi pemerintah, dampak tidak hanya dilihat dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari perubahan kondisi organisasi, kinerja pegawai, serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.

¹⁷ Putu Adi Erawan, Md Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiarta, “Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng.”

¹⁸ Prameswari et al., “Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for Money Di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022).”

Menurut William N. Dunn, dampak merupakan konsekuensi nyata yang muncul setelah suatu kebijakan atau program publik diimplementasikan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Dampak dapat berupa perubahan sosial, ekonomi, administratif, maupun perubahan perilaku organisasi. Oleh karena itu, evaluasi dampak menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik.¹⁹

Dalam perspektif manajemen sektor publik, dampak tidak hanya berkaitan dengan pencapaian output, tetapi lebih menekankan pada outcome dan perubahan jangka panjang yang dihasilkan. Efisiensi anggaran, misalnya, tidak hanya bertujuan untuk menghemat pengeluaran pemerintah, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki tata kelola organisasi, serta mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah.

a. Konsep Dampak dalam Organisasi Publik

Dalam organisasi sektor publik, dampak sering dihubungkan dengan perubahan kinerja organisasi setelah diterapkannya suatu sistem pengelolaan tertentu. James E. Anderson menjelaskan bahwa dampak kebijakan publik merupakan hasil nyata yang muncul setelah suatu tindakan pemerintah dilaksanakan dan dirasakan oleh organisasi maupun masyarakat. Dampak dalam organisasi publik dapat mencerminkan perubahan efektivitas kerja pegawai, peningkatan atau penurunan produktivitas organisasi, perubahan pola kerja birokrasi, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan publik.²⁰

Dengan demikian, konsep dampak membantu peneliti memahami apakah suatu kebijakan atau penerapan sistem benar-benar memberikan perubahan yang diharapkan.

¹⁹ Silaban, Lismono, and Silaen, "Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta."

²⁰ Lona, Perseveranda, and Manafe, "Analisis Ekonomis , Efisiensi Dan Efektivitas."

b. Jenis-Jenis Dampak

Dampak suatu kebijakan atau program dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak positif merupakan perubahan yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Dalam konteks efisiensi anggaran, dampak positif dapat berupa penggunaan anggaran yang lebih hemat, peningkatan disiplin kerja pegawai, optimalisasi sumber daya organisasi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2) Dampak Negatif

Selain menghasilkan manfaat, suatu kebijakan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Efisiensi anggaran yang terlalu ketat misalnya dapat menyebabkan keterbatasan fasilitas kerja, berkurangnya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai, atau meningkatnya beban kerja aparatur.²¹

3) Dampak Langsung

Dampak langsung adalah perubahan yang dapat segera dirasakan setelah suatu program dilaksanakan, seperti pengurangan biaya operasional atau perubahan mekanisme kerja organisasi.

4) Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung muncul dalam jangka waktu tertentu, misalnya perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme pegawai, atau perbaikan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

c. Pengukuran Dampak dalam Organisasi Pemerintah

Dalam penelitian administrasi publik, pengukuran dampak biasanya dikaitkan dengan indikator kinerja organisasi. Dampak penerapan efisiensi

²¹ Darmawan et al., "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi."

anggaran pada pemerintah daerah dapat dianalisis melalui beberapa aspek, antara lain kinerja pegawai, efektivitas pelaksanaan tugas, produktivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pengelolaan keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.²²

Pengukuran tersebut membantu menjelaskan sejauh mana efisiensi anggaran tidak hanya menghasilkan penghematan biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja organisasi pemerintah.

3. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merupakan salah satu konsep fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik, yang menekankan bagaimana pemerintah mampu menggunakan anggaran secara hemat, optimal, dan produktif untuk menghasilkan output yang maksimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, efisiensi anggaran bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi bagaimana anggaran digunakan sesuai kebutuhan riil, tidak boros, dan mampu memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat dan organisasi.²³

Efisiensi anggaran menekankan hubungan antara *input* (sumber daya seperti anggaran, SDM, waktu, sarana) dengan *output* (hasil kerja, layanan publik, laporan keuangan). Semakin besar output yang dihasilkan dari input yang sedikit, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu instansi. Menurut Suliantoro dalam artikelnya yang berjudul “Menimbang Kembali Formula Efisiensi pada Evaluasi Kinerja Anggaran”, efisiensi tidak semata diukur dari perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana hasil penggunaan anggaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa efisiensi yang ideal harus mencakup aspek ekonomis, efektivitas hasil, dan

²² Putu Adi Erawan, Md Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiarta, “Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng.”

²³ Hotimah And Fattah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Kota Palu.”

kemampuan pemerintah meminimalkan pemborosan tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.²⁴

Dalam konteks pemerintahan daerah, efisiensi anggaran menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan program kerja sesuai perencanaan tanpa terjadinya pemborosan. Efisiensi juga menandakan kemampuan organisasi untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang benar-benar produktif dan bernilai tambah. Misalnya, pengeluaran yang dialokasikan untuk pelatihan pegawai atau penguatan sistem pelaporan keuangan dapat dianggap efisien jika terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi.²⁵ Sebaliknya, anggaran yang besar namun tidak berdampak terhadap peningkatan kinerja akan mencerminkan penggunaan dana yang tidak efisien.

Bagi BKAD Kabupaten Pinrang, teori efisiensi anggaran sangat relevan karena instansi ini berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah yang bertanggung jawab memastikan setiap rupiah dana publik digunakan secara tepat. Efisiensi di lingkungan BKAD bukan sekadar tentang penghematan anggaran, tetapi tentang bagaimana kegiatan yang dijalankan memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Misalnya, penerapan sistem pelaporan digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi kesalahan, sehingga mendukung efisiensi secara keseluruhan.²⁶

Selain itu, efisiensi anggaran menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran. Pengawasan internal yang baik dapat mencegah terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaan dana. Efisiensi tidak akan tercapai tanpa adanya sistem akuntabilitas yang kuat

²⁴ Suliantoro, "Menimbang Kembali Formula Efisiensi Pada Evaluasi Kinerja Anggaran."

²⁵ Akbar et al., "Assessing the Effectiveness and Efficiency of the Public Service Budget."

²⁶ Andi Aliyyah Ramadhani Sam, Haliah Haliah, and Andi Kusumawati, "Pengungkapan Konsep Transparansi, Akuntabilitas, Dan Value for Money Dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis."

dan kesadaran pegawai terhadap tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori efisiensi anggaran digunakan untuk menjelaskan bagaimana BKAD Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap proses keuangan daerah serta bagaimana penerapan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Efisiensi anggaran merupakan upaya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai hasil yang maksimal. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam penggunaan dana serta ketepatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini efisiensi anggaran diukur melalui tiga indikator, yaitu hemat, transparan, dan tepat sasaran, yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran dalam mendukung kinerja organisasi.²⁷

a. Hemat

Hemat merupakan prinsip efisiensi yang menekankan penggunaan anggaran secara cermat, ekonomis, dan tidak berlebihan tanpa mengurangi kualitas hasil yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penghematan bukan berarti mengurangi seluruh pengeluaran, melainkan memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Anggaran yang hemat ditunjukkan melalui kemampuan instansi dalam menekan biaya operasional yang tidak penting, menghindari pemborosan, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Pada BKAD Kabupaten Pinrang, prinsip hemat dapat diterapkan melalui pengurangan penggunaan kertas dengan sistem digitalisasi

²⁷ Darmawan et al., "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi."

dokumen, pengendalian biaya perjalanan dinas, penghematan penggunaan listrik dan air, serta optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Dengan penerapan prinsip hemat, instansi dapat mengalokasikan anggaran yang tersisa untuk program-program yang lebih prioritas dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, semakin kecil biaya yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama atau lebih baik, maka semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran yang dicapai.²⁸

b. Transparan

Transparan adalah prinsip pengelolaan anggaran yang menekankan keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Transparansi memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana anggaran digunakan, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan anggaran. Dalam konsep efisiensi anggaran, transparansi menjadi faktor penting karena penggunaan anggaran yang terbuka akan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas setiap kegiatan yang dilaksanakan.²⁹

Di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang, transparansi dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, penyajian informasi anggaran secara jelas, penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital, serta keterbukaan terhadap proses audit dan pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya transparansi, setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

²⁸ Suliantoro, "Menimbang Kembali Formula Efisiensi Pada Evaluasi Kinerja Anggaran."

²⁹ Habibi, Utami, and Samanto, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah."

c. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan prinsip yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan prioritas yang telah direncanakan. Anggaran yang tepat sasaran berarti dana yang tersedia dialokasikan pada program atau kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi maupun masyarakat. Dalam perspektif efisiensi, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya penghematan yang dilakukan, tetapi juga dari kemampuan anggaran tersebut menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan target yang ditetapkan.³⁰

Pada BKAD Kabupaten Pinrang, ketepatan sasaran dapat dilihat dari bagaimana anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, seperti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengembangan kompetensi pegawai, modernisasi sistem informasi keuangan, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan. Jika anggaran dialokasikan pada kegiatan yang relevan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara tepat sasaran.

4. Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen keuangan tahunan yang disusun secara sistematis dalam bentuk rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu periode anggaran. Anggaran ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

³⁰ Tumija and Zakky Ramadhan, "Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Affiliation."

publik. Anggaran pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan publik, serta alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kualitas anggaran yang baik sangat menentukan efektivitas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan organisasi.³¹

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk menjaga akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Anggaran pemerintah daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, anggaran tidak bisa disusun sembarangan, tetapi harus melalui proses yang terukur, terencana, dan berbasis kebutuhan riil daerah.³²

Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, anggaran sangat berkaitan erat dengan fungsi-fungsi institusi, seperti pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan, pengendalian anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah. BKAD bukan hanya sebagai pengguna anggaran, tetapi juga sebagai instansi yang mengatur seluruh siklus anggaran untuk seluruh OPD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang anggaran sangat penting dalam penelitian ini, terutama untuk melihat bagaimana kebijakan efisiensi diterapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Anggaran pemerintah daerah juga merupakan alat untuk memastikan bahwa pemerintah mampu memberikan layanan publik secara efektif. Jika anggaran dikelola dengan buruk, maka program tidak akan terlaksana,

³¹ Kusuma and Budiwitjaksono, "Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Gresik."

³² Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/Pbi/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika.

pelayanan publik akan terganggu, dan kinerja pemerintah akan menurun. Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara efisien dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sangat berkaitan dengan hal tersebut, karena efisiensi anggaran adalah kunci dalam memastikan bahwa anggaran publik benar-benar memberi manfaat.³³ Dalam konteks BKAD, anggaran melekat pada:

a. Belanja Operasional

Belanja operasional adalah pengeluaran rutin daerah yang digunakan untuk mendukung aktivitas administrasi dan fungsi pelayanan publik setiap harinya. Belanja ini meliputi belanja ATK, listrik, air, internet, pemeliharaan gedung, konsumsi rapat, perjalanan dinas, serta belanja administrasi lainnya. Efisiensi belanja operasional sangat penting karena belanja ini sering kali cukup besar dalam struktur APBD. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan seperti pembatasan perjalanan dinas, pembatasan konsumsi rapat, efisiensi penggunaan listrik, digitalisasi arsip, dan manajemen aset.

b. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, honorarium, serta belanja kegiatan yang melekat pada pegawai. Meskipun belanja pegawai bersifat wajib dan mengikat, pemerintah tetap dapat melakukan efisiensi melalui penataan beban kerja, digitalisasi pelayanan, dan pengurangan kegiatan yang tidak produktif. Belanja pegawai sangat mempengaruhi struktur APBD karena umumnya mencapai lebih dari 30–40%.

c. Belanja Program/Kegiatan Pelayanan Keuangan

Ini adalah belanja yang spesifik untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BKAD seperti penyusunan LKPD, pelatihan aparatur,

³³ Devinci Antasena, Yosefina Crisstin, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.”

penyusunan laporan pendapatan, verifikasi SPM/SP2D, pembinaan keuangan OPD, serta operasional sistem informasi (SIPD, SIMDA). Efisiensi pada belanja ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan penggunaan aplikasi digital, meminimalkan kegiatan tatap muka yang tidak perlu, dan memaksimalkan output kegiatan per unit biaya.

5. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra, RKPD, dan PK (Perjanjian Kinerja). Dalam sektor publik, kinerja organisasi tidak hanya diukur dari output internal, tetapi lebih menekankan seberapa besar manfaat atau *outcome* yang dihasilkan bagi publik. Kinerja organisasi mencerminkan kapasitas institusi dalam mengelola sumber daya, melaksanakan fungsi pelayanan, serta menghasilkan hasil kerja yang sesuai dengan standar kualitas, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan efektivitas.

Menurut Armstrong, kinerja organisasi adalah hasil gabungan antara kapasitas organisasi, proses kerja, sistem manajemen, dan perilaku anggota organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintah, kinerja organisasi berkaitan erat dengan kemampuan instansi melaksanakan mandat hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa organisasi yang berkinerja baik bukan hanya yang mampu menyelesaikan tugasnya, tetapi juga memastikan bahwa hasil kerja tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat.³⁴

Pada instansi seperti BKAD Kabupaten Pinrang, kinerja organisasi mencakup kualitas pengelolaan keuangan daerah, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, efektivitas pengelolaan PAD, dan kualitas pelayanan administrasi keuangan kepada OPD. Karena BKAD memiliki tanggung jawab

³⁴ Armstrong, *Performance Management*. 2018

strategis dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, kinerja organisasi menjadi sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Jika BKAD memiliki kinerja buruk, maka dampaknya akan sangat luas, termasuk keterlambatan penyusunan APBD, laporan keuangan tidak akurat, hingga opini BPK yang dapat menurun.³⁵

Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan anggaran. Ketika anggaran dikelola dengan efisien, maka organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program prioritas, meningkatkan layanan, serta memperbaiki proses kerja. Sebaliknya, jika anggaran digunakan secara boros, maka organisasi akan kesulitan mencapai target karena sumber daya menjadi tidak memadai. Inilah mengapa penelitian ini sangat relevan untuk melihat bagaimana efisiensi anggaran yang diterapkan BKAD berdampak pada kinerja organisasi. Dalam BKAD, kinerja organisasi dapat dilihat dari:

a. Kualitas Pengelolaan Keuangan

Kualitas pengelolaan keuangan mencakup kemampuan BKAD dalam menyusun laporan secara akurat, mematuhi SAP, dan mengelola transaksi daerah secara transparan. Jika kualitas buruk, akan muncul temuan BPK, opini menurun, atau ketidaksesuaian belanja. Kualitas pengelolaan keuangan merupakan indikator utama tata kelola pemerintahan.³⁶

b. Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD

Ketepatan waktu adalah indikator kritis bagi kinerja organisasi. LKPD yang terlambat disusun menunjukkan lemahnya koordinasi, kurangnya efisiensi proses, atau rendahnya kualitas SDM. Ketepatan waktu berkaitan langsung dengan pengambilan kebijakan dan evaluasi APBD.

³⁵ Devinci Antasena, Yosefina Crisstin, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.”

³⁶ Ferlia et al., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BKAD Kabupaten Malang).”

c. Pencapaian PAD

Kinerja organisasi juga dilihat dari kemampuan BKAD mencapai target pendapatan daerah. Jika PAD rendah, maka kemampuan pemerintah membiayai program prioritas menjadi terbatas. Oleh karena itu, pencapaian PAD menjadi salah satu indikator kinerja yang penting.

d. Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan

BKAD melayani seluruh OPD dalam proses penatausahaan keuangan. Pelayanan ini harus cepat, akurat, ramah, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pelayanan yang tidak berkualitas akan menghambat pelaksanaan anggaran seluruh OPD.³⁷

6. Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberhasilan organisasi publik, termasuk BKAD Kabupaten Pinrang. Kinerja pegawai diartikan sebagai hasil kerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan, berdasarkan standar, prosedur, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Robbins, kinerja pegawai adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan standar yang berlaku. Dalam organisasi sektor publik, kinerja pegawai sangat menentukan kualitas pelayanan publik karena pegawai adalah pelaksana utama seluruh tugas administratif dan teknis.

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan, motivasi, disiplin, kondisi lingkungan kerja, ketersediaan anggaran, dan sistem manajemen organisasi. Mangkunegara menjelaskan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh dua elemen besar yaitu *ability* (kemampuan) dan *motivation* (motivasi). Jika salah satu faktor tersebut rendah, maka kinerja pegawai akan menurun meskipun standar organisasi sudah jelas. Hal ini sangat relevan bagi BKAD yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah. Beban

³⁷ Auditya, Husaini, and Lismawati, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah."

kerja di BKAD sangat tinggi, membutuhkan ketelitian, ketepatan waktu, serta penguasaan teknologi, sehingga kinerja pegawai menjadi kunci dalam menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam konteks penelitian ini, kinerja pegawai penting karena efisiensi anggaran sering berdampak langsung pada jumlah sumber daya, fasilitas kerja, pelatihan SDM, serta beban kerja pegawai. Ketika anggaran dilakukan efisiensi secara berlebihan dan tidak tepat, bisa terjadi peningkatan beban kerja yang mengakibatkan kelelahan, stres, dan penurunan kinerja pegawai. Sebaliknya, efisiensi yang dilakukan dengan tepat justru dapat memaksimalkan kinerja pegawai karena mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas kerja.³⁸

Kinerja pegawai juga berkaitan dengan bagaimana pegawai menjalankan tugas teknis seperti pengelolaan SPM/SP2D, penyusunan laporan keuangan, verifikasi dokumen, pencatatan akuntansi, serta pelayanan administrasi kepada OPD. Semua tugas ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, penelitian mengenai efisiensi anggaran dan kinerja pegawai sangat relevan karena efisiensi dapat mempengaruhi fasilitas kerja, pelatihan teknis, dan penyediaan alat kerja yang mendukung produktivitas.³⁹ Kinerja pegawai dalam organisasi publik biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator:

1) Kualitas Kerja

Kualitas kerja mencakup ketelitian, kerapian, akurasi data, dan kesesuaian hasil kerja dengan SOP. Di BKAD, kualitas kerja sangat penting karena kesalahan kecil dalam pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dapat menyebabkan temuan BPK atau ketidaksesuaian laporan. Pegawai dituntut bekerja teliti, cermat, dan sesuai standar teknis.

³⁸ Auliza Oktari, Agus Solikhin, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Dengan Kompetensi Pegawai Sebagai Variabel Mediasi."

³⁹ Putri and Akbar, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya."

2) Kuantitas Kerja

Diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. BKAD memiliki volume pekerjaan besar, terutama pada masa penyusunan APBD dan LKPD. Pegawai yang dapat menyelesaikan tugas lebih banyak tanpa mengorbankan kualitas dianggap berkinerja tinggi.

3) Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan apakah tugas selesai sesuai deadline. Dalam ranah keuangan daerah, ketepatan waktu sangat penting karena keterlambatan dapat mempengaruhi jadwal pencairan anggaran, laporan keuangan, bahkan opini BPK.

4) Disiplin

Indikator ini menyangkut kehadiran, kepatuhan pada aturan kerja, dan pelaksanaan tugas tanpa pelanggaran. Disiplin tinggi mendukung kelancaran proses penatausahaan keuangan.

5) Kemampuan Teknis

Pegawai BKAD harus menguasai teknologi seperti SIPD, SIMDA, aplikasi perbendaharaan, serta memahami regulasi keuangan daerah. Pegawai dengan kemampuan teknis baik akan menghasilkan kualitas kerja yang lebih tinggi.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama mengelola seluruh aspek keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, hingga pengelolaan pendapatan daerah. BKAD adalah "jantung" pengelolaan keuangan daerah karena setiap transaksi keuangan pemerintah daerah harus melalui sistem yang dikendalikan oleh BKAD.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, BKAD berfungsi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang keuangan yang memiliki tanggung

jawab untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. BKAD memegang peran strategis karena kualitas APBD, kelancaran pembangunan daerah, serta opini BPK terhadap laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja BKAD.⁴⁰

Secara struktural, BKAD bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh OPD mengenai penganggaran, monitoring realisasi anggaran, validasi dokumen keuangan, pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, serta pengendalian PAD. Dengan demikian, BKAD adalah institusi teknis yang memastikan bahwa seluruh transaksi pemerintah daerah sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi.

Dalam konteks penelitian ini, BKAD menjadi objek penting karena efisiensi anggaran serta kinerja pegawai sangat ditentukan oleh sistem kerja, kebijakan pimpinan, dan beban kerja organisasi. Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap fasilitas kerja pegawai BKAD, kegiatan operasional, serta proses penyusunan laporan keuangan. Adapun fungsi atau tugas pokok BKAD:

1) Pembatasan Belanja Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja operasional yang sering menimbulkan pemborosan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Banyak daerah mengalami beban anggaran yang besar karena perjalanan dinas dilakukan terlalu sering, tidak berbasis kebutuhan, atau biaya perjalanan tidak sesuai standar. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Pembatasan ini dilakukan melalui pengurangan frekuensi perjalanan, pembatasan jumlah peserta, penyesuaian standar

⁴⁰ Lembar Negara Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/Pbi/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika.

harga sesuai Permendagri, serta pemilihan perjalanan yang benar-benar prioritas.

Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi melalui rapat virtual (*Zoom* atau *Google Meet*) sehingga koordinasi antar OPD dapat tetap dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan fisik. Kebijakan ini terbukti mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan uang harian secara signifikan. Pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran untuk menekan belanja perjalanan dinas dan mendorong penggunaan rapat virtual, terutama setelah pandemi.

Dengan pembatasan perjalanan dinas, pemerintah daerah dapat menghemat anggaran dan mengalihkannya ke belanja yang lebih prioritas, misalnya pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, atau pemeliharaan infrastruktur. Kebijakan ini tidak hanya menekan biaya tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu pegawai.

2) Optimalisasi Belanja Operasional

Belanja operasional merupakan komponen yang sangat besar dalam APBD, yang meliputi belanja listrik, air, telekomunikasi, ATK, pemeliharaan gedung, dan kebutuhan operasional lainnya. Efisiensi pada pos ini sangat penting karena sifatnya rutin dan berulang setiap tahun. Optimalisasi belanja operasional dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik melalui manajemen energi, mengurangi pembelian ATK dengan sistem paperless, melakukan pemeliharaan aset secara preventif, dan memastikan pengadaan barang/jasa mengikuti standar harga yang wajar.

Penghematan 10–20% pada belanja operasional sangat mungkin dicapai tanpa mengurangi kualitas layanan apabila pemerintah menerapkan prinsip pengadaan berorientasi nilai (*value-based procurement*). Pemerintah juga didorong untuk menggunakan katalog elektronik (*e-*

katalog) sehingga harga barang lebih transparan dan kompetitif. Optimalisasi belanja operasional terbukti meningkatkan efisiensi dan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan prioritas.⁴¹

3) Digitalisasi Pelayanan Keuangan

Digitalisasi pelayanan keuangan menjadi salah satu strategi paling efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan aplikasi seperti SIPD RI, SIKD, SIMDA, *e-Office*, dan *e-Procurement*, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya muncul dari proses manual seperti pencetakan dokumen, pengarsipan fisik, penggunaan ATK, transportasi, serta waktu kerja pegawai.⁴²

Digitalisasi juga mempercepat proses penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen, penyusunan laporan keuangan, dan pelayanan kepada OPD. Misalnya, penggunaan aplikasi SP2D online mempersingkat proses pencairan anggaran tanpa memerlukan tatap muka langsung. Selain menghemat anggaran, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses terekam secara elektronik dan dapat diaudit.

Implementasi digitalisasi terbukti dapat menurunkan biaya administrasi hingga 30% di beberapa daerah, karena mengurangi kebutuhan pengarsipan fisik, mempercepat proses layanan, dan mengurangi risiko human error.

4) Realokasi Belanja Prioritas

Realokasi belanja prioritas adalah kebijakan pemindahan anggaran dari kegiatan yang kurang penting menuju kegiatan yang lebih mendukung

⁴¹ Luky Kurniawan, Kurnia Warman, “Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi.”

⁴² Putri Novianti, “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Ri Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bpkad Kabupaten Jayapura.”

pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas pegawai, dan penyusunan laporan keuangan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang terbatas digunakan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.⁴³

Dalam konteks efisiensi anggaran, realokasi menjadi strategi penting ketika belanja rutin terlalu besar dan menghambat belanja pembangunan (*capital expenditure*). Melalui realokasi, pemerintah dapat meningkatkan proporsi belanja yang produktif dan menekan belanja yang tidak terlalu memberikan dampak. Proses realokasi juga dilakukan berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.

Dengan adanya realokasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki kinerja keuangan, dan mendukung pencapaian indikator RPJMD.

5) Pengawasan Penggunaan Anggaran

Pengawasan penggunaan anggaran merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar dilaksanakan. Tanpa mekanisme pengawasan, efisiensi anggaran hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata. Pengawasan dilakukan melalui monitoring realisasi anggaran, review internal oleh APIP (Inspektorat), audit reguler oleh BPK, serta evaluasi internal BKAD terkait pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan yang efektif membantu mendeteksi pemborosan, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai standar biaya dan SOP. Monitoring dilakukan sepanjang tahun melalui laporan realisasi anggaran, sementara audit BPK menjadi alat kontrol akhir untuk memastikan akuntabilitas keuangan.

⁴³ Tumija and Zakky Ramadhan, “Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Affiliation.”

Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan sistem pengendalian internal (SPIP) untuk memperkuat pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang baik, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja organisasi, karena setiap penghematan tetap diarahkan agar tidak mengurangi kualitas layanan publik.⁴⁴

8. Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Menurut perspektif akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Triyuwono, akuntansi dipahami sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi syariah relevan digunakan sebagai landasan konseptual dalam menilai pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKAD).

Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap pengelolaan sumber daya keuangan daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan benar. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah yang menuntut efisiensi, transparansi, serta peningkatan kinerja organisasi.⁴⁵ Dengan demikian, prinsip akuntansi syariah dapat digunakan sebagai kerangka nilai untuk menilai sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berdampak positif terhadap kinerja organisasi.

⁴⁴ R. U. Siahaan, "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Peraturan Perundangan, Dan Efektivitas Pengendalian Intern."

⁴⁵ Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

a. Prinsip Pertanggungjawaban (Amanah)

Pertanggungjawaban merupakan inti dari akuntansi syariah, di mana setiap aktivitas pengelolaan keuangan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada Allah SWT. Dalam konteks Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKAD), prinsip pertanggungjawaban tercermin dalam kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Efisiensi anggaran yang diterapkan tidak hanya ditujukan untuk penghematan semata, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan sosial.⁴⁶

Prinsip pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).⁴⁷

Ayat ini mengandung makna bahwa setiap amanah yang diterima oleh seseorang atau lembaga wajib dikelola dan disampaikan secara bertanggung jawab serta tidak disalahgunakan. Amanah dalam ayat tersebut mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, termasuk pengelolaan harta dan keuangan publik. Selain itu, ayat ini juga menegaskan

⁴⁶ Muhammad Khoirul Anam, Asmitiya Meilinda, “Konsep Dan Teori Akuntansi Keuangan Syariah.”

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Qs.An-Nisa' [4]:58*, 2019.

pentingnya keadilan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga amanah yang dijalankan tidak merugikan pihak lain.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, ayat ini memberikan landasan normatif bahwa anggaran daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan adil. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh BKAD harus memiliki dasar yang jelas, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada peningkatan kinerja organisasi tanpa mengabaikan tanggung jawab pelayanan publik.

b. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Efisiensi Anggaran

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah, sebagaimana dikemukakan oleh Triyuwono, menekankan perlunya perlakuan yang seimbang dan proporsional terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan anggaran daerah, keadilan berarti bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menimbulkan ketimpangan atau merugikan unit kerja tertentu secara tidak proporsional. Setiap pengurangan atau penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kepentingan pelayanan publik.⁴⁸

Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, prinsip keadilan menjadi penting agar efisiensi anggaran yang diterapkan tetap mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Kebijakan efisiensi yang adil akan mendorong penggunaan anggaran secara optimal, menjaga keseimbangan antarprogram, serta memastikan bahwa tujuan organisasi tetap dapat dicapai secara efektif.

⁴⁸ Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori.

c. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran dalam Pelaporan Keuangan Daerah

Triyuwono menegaskan bahwa kebenaran dan kejujuran merupakan nilai fundamental dalam akuntansi syariah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip ini menuntut agar seluruh informasi keuangan disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau rekayasa data. Pelaporan realisasi anggaran harus mencerminkan penggunaan anggaran yang nyata, termasuk dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi.

Penerapan prinsip kebenaran dalam pelaporan keuangan BKAD sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan laporan keuangan yang jujur dan benar, evaluasi terhadap efisiensi anggaran dapat dilakukan secara objektif, sehingga hasil penelitian mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah tersebut, efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya penghematan yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, dan jujur. Oleh karena itu, prinsip akuntansi syariah menjadi landasan penting dalam menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja BKAD Kabupaten Pinrang.

C. Tinjauan Konseptual

1. Efisiensi Anggaran

Konsep efisiensi anggaran berhubungan dengan bagaimana pemerintah daerah menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Menurut Milenia, Sibarani, dan Hidayat dalam penelitiannya “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara”, efisiensi anggaran merupakan ukuran sejauh mana realisasi

anggaran pemerintah mendekati target rencana yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan pemborosan. Penelitian ini menemukan bahwa efisiensi anggaran yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan produktivitas kerja aparatur.

Efisiensi anggaran tidak hanya menitikberatkan pada penghematan, tetapi juga pada sejauh mana pengeluaran pemerintah memberikan hasil nyata sesuai dengan rencana dan sasaran kinerja. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisiensi berarti menggunakan dana publik secara hemat tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang efisien adalah anggaran yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tepat waktu, serta dievaluasi dengan cermat agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat.⁴⁹

Selain itu, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola input (sumber daya) agar menghasilkan output yang optimal. Misalnya, dalam proses penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi karena mempercepat waktu kerja dan mengurangi kesalahan manusia.⁵⁰ Di BKAD Kabupaten Pinrang, penerapan efisiensi anggaran dapat diwujudkan melalui perencanaan keuangan yang matang, pengendalian belanja operasional, serta optimalisasi sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan produktif.

Konsep efisiensi anggaran juga mengandung nilai moral dan etika publik. Pemerintah yang efisien menunjukkan tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana publik. Ketika anggaran dikelola dengan

⁴⁹ Nasution, "Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Pada Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan Tahun 2017-2019."

⁵⁰ Lona, Perseveranda, and Manafe, "Analisis Ekonomis , Efisiensi Dan Efektivitas."

hemat, transparan, dan tepat sasaran, maka akan muncul kepercayaan dan legitimasi publik yang lebih kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.⁵¹

2. Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah

Kinerja organisasi pemerintah daerah mencerminkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.⁵² Menurut Mahendra, Anggraini, dan Sari dalam jurnalnya “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Efisiensi dan Efektivitas Anggaran”, kinerja organisasi publik dapat diukur melalui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, di mana efisiensi menunjukkan kemampuan menggunakan sumber daya secara hemat, dan efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada manajemen keuangan yang transparan dan efisien.

Kinerja organisasi dalam konteks sektor publik biasanya diukur melalui indikator hasil kerja (*output*), manfaat (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang dihasilkan dari program-program pemerintah.⁵³ Dalam instansi seperti BKAD Kabupaten Pinrang, kinerja tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari sejauh mana kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi terhadap peningkatan layanan keuangan daerah. Kinerja organisasi juga mencakup tiga aspek utama:

- 1) Produktivitas kerja, yaitu sejauh mana pegawai mampu menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien

⁵¹ Sari, Mintarti, and Pattisahusiwa, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.”

⁵² Silvida and Fadlli, “Analisis Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan dan Pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.”

⁵³ Palupi et al., “Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021.”

- 2) Kualitas pelayanan, yakni kemampuan instansi dalam memberikan layanan yang tepat waktu dan memuaskan masyarakat.
- 3) Disiplin dan tanggung jawab pegawai, yang mencerminkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas.

Ketika ketiga aspek ini dijalankan dengan baik, maka kinerja organisasi akan meningkat secara berkelanjutan.⁵⁴

Dalam konteks efisiensi anggaran, kinerja organisasi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bijak. Penggunaan anggaran yang efisien akan memperbaiki kinerja organisasi karena mengurangi beban keuangan dan meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan yang lebih produktif. Sebaliknya, pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja karena menghambat pencapaian tujuan organisasi.

3. Keterkaitan antara Efisiensi Anggaran dan Kinerja Organisasi

Hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi pemerintah daerah sangat erat dan bersifat timbal balik. Efisiensi anggaran yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan kinerja organisasi yang tinggi akan memperkuat penerapan efisiensi anggaran. Menurut Junaid, Kanan, dan Trisnawan dalam penelitiannya “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kota Tarakan”, pelaksanaan anggaran yang efisien berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah karena mendorong disiplin fiskal dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Mereka menemukan bahwa ketika pemerintah daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, maka kinerja pelayanan publik meningkat secara signifikan.

⁵⁴ Bili and Siswati, “Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022.”

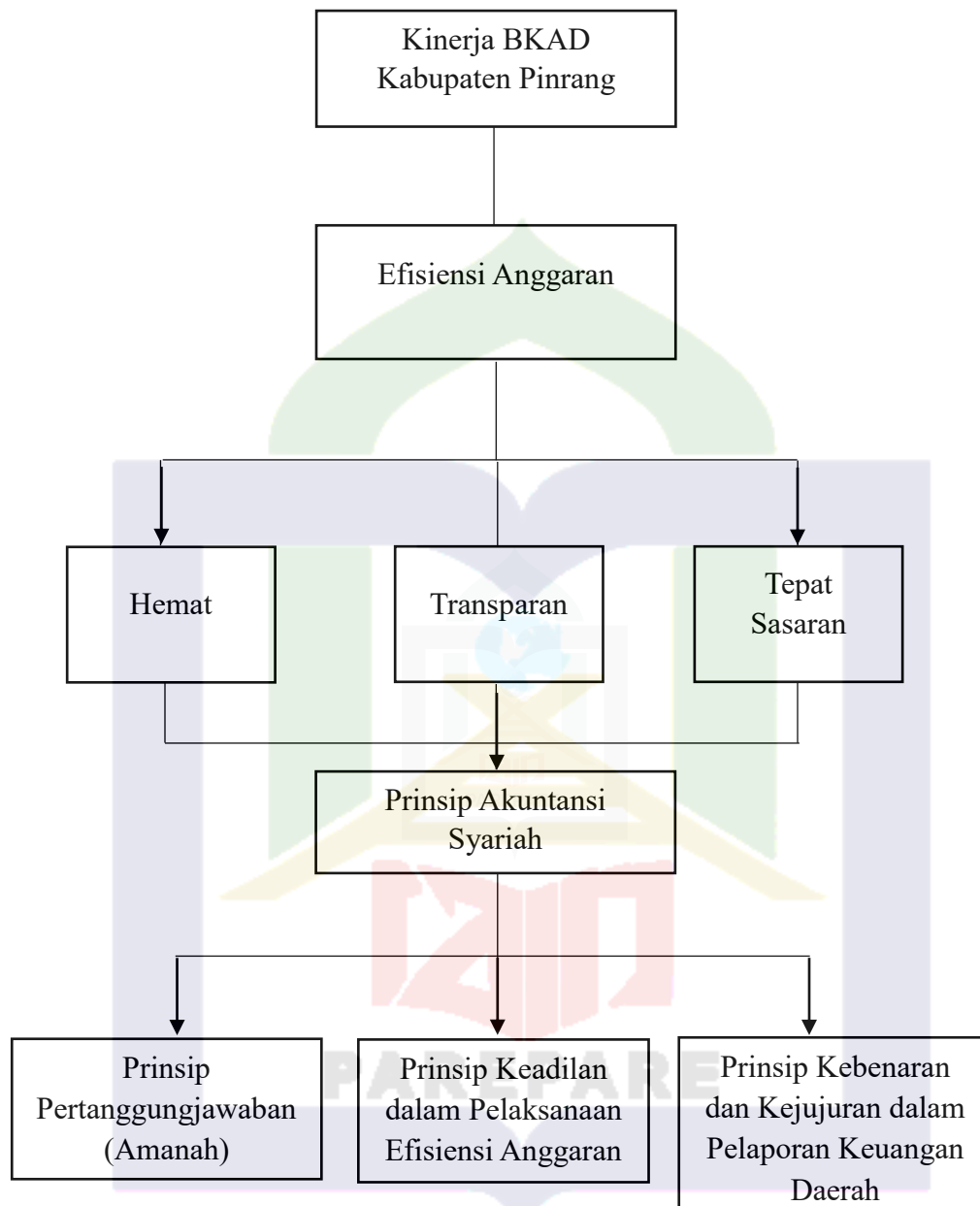
Dalam praktiknya, efisiensi anggaran mendorong organisasi untuk memprioritaskan kegiatan yang paling produktif dan berdampak besar terhadap tujuan daerah. Efisiensi juga membantu menciptakan pola kerja yang disiplin, di mana setiap pegawai dituntut untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ketika efisiensi diterapkan secara konsisten, organisasi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah.

Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, keterkaitan antara efisiensi dan kinerja dapat dilihat dari bagaimana kebijakan efisiensi diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Misalnya, penggunaan sistem pelaporan digital mampu menghemat waktu dan biaya, sekaligus meningkatkan akurasi data keuangan. Efisiensi semacam ini tidak hanya meningkatkan kinerja pegawai secara individu, tetapi juga memperbaiki citra dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.⁵⁵ Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai faktor penentu dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logika hubungan antara efisiensi anggaran dengan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁵ Saputri et al., "Penerapan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Prinsip Ekonomi Islam."



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran.

Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap persepsi, pengalaman, dan pemahaman pegawai terkait pelaksanaan efisiensi anggaran, termasuk strategi yang diterapkan, faktor pendukung dan penghambat, serta perubahan yang dirasakan terhadap kinerja organisasi setelah kebijakan efisiensi diterapkan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara apa adanya berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian.⁵⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana efisiensi anggaran diterapkan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna, pandangan, dan

⁵⁶ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.

pengalaman pegawai sebagai pelaku langsung dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari masalah sosial atau manusia.⁵⁷ Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena efisiensi anggaran secara lebih komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti tidak hanya berfokus pada angka atau hasil statistik, tetapi juga pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap proses serta dinamika yang terjadi di lapangan.⁵⁸ Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menampilkan fakta-fakta empiris sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Bintang, Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tepatnya di belakang Kantor Bupati Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan, dimulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, hingga tahap analisis dan penarikan kesimpulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana efisiensi anggaran diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

⁵⁷ John W Creswell, Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

⁵⁸ Anelda Ultavia, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi."

Kabupaten Pinrang serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi dan pegawai. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran secara kuantitatif menggunakan rasio keuangan, melainkan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pegawai dalam proses penerapan kebijakan efisiensi tersebut di lingkungan kerja mereka. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep efisiensi diinterpretasikan dalam praktik, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi cara kerja dan hasil kinerja instansi.⁵⁹

Penelitian difokuskan pada dua dimensi utama. Pertama, penerapan efisiensi anggaran yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, termasuk strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Kedua, dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi dan pegawai, yang meliputi produktivitas kerja, ketepatan pelaksanaan tugas, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta pengaruhnya terhadap motivasi, disiplin, dan perilaku kerja pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang.⁶⁰ Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap bagaimana efisiensi anggaran dapat berdampak terhadap perilaku kerja, motivasi, dan kedisiplinan pegawai di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi, bukan pada pengukuran angka atau statistik. Data ini berbentuk kata-kata, kalimat, dan

⁵⁹ Rahman and Saputra, "Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap."

⁶⁰ Priagung, Sinoeraya, and Mafudi, "Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara)."

narasi yang menggambarkan persepsi, pandangan, serta pengalaman pegawai terkait penerapan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.

Menurut Sugiyono, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau deskripsi yang memiliki makna lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti.⁶¹ Oleh karena itu, jenis data ini dianggap paling sesuai untuk menggali bagaimana efisiensi anggaran dipahami dan dijalankan di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan anggaran. Informasi ini dikumpulkan untuk memahami bagaimana efisiensi anggaran diterapkan serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja instansi.⁶²

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan anggaran instansi, serta literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efisiensi anggaran dan kinerja organisasi.⁶³

⁶¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

⁶² Akhmad, "Analisis Implementasi Sistem Manajemen Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono."

⁶³ Cahyaningrum and Sitoresmi, "Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Di Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024."

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan situasi kerja di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. Melalui observasi ini, peneliti berusaha untuk melihat secara nyata bagaimana efisiensi anggaran diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti proses pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan administrasi, dan perilaku kerja pegawai. Observasi juga membantu peneliti memahami bagaimana pola kerja, koordinasi antarbagian, serta kebiasaan pegawai dalam mendukung tercapainya efisiensi dan peningkatan kinerja. Teknik observasi ini penting karena dapat memberikan gambaran faktual yang tidak selalu dapat diungkapkan melalui wawancara. Hasil observasi kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang akan digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut.⁶⁴

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai BKAD Kabupaten Pinrang yang dipilih secara purposif karena dianggap mengetahui dan memahami proses pengelolaan serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Dalam pelaksanaannya, jumlah informan diperkirakan berjumlah 5 orang yang berasal dari pihak internal maupun eksternal.

Wawancara menggunakan format semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara bebas dan mendalam. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai pemahaman informan terhadap efisiensi

⁶⁴ Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)."

anggaran, strategi yang diterapkan dalam pelaksanaannya, serta dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi dan kinerja individu di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendukung pencapaian tujuan penelitian.⁶⁵

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan anggaran, dan dokumen peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dokumen pendukung lain seperti literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat dasar analisis. Teknik ini penting karena membantu peneliti dalam memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh di lapangan serta memberikan data tertulis yang objektif.⁶⁶

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi dan kenyataan di lapangan secara objektif. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui angka atau statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi melalui ketepatan, konsistensi, dan kejujuran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik.⁶⁷ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam penelitian

⁶⁵ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.

⁶⁶ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.

⁶⁷ Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health."

ini, kredibilitas data dijaga melalui beberapa cara, seperti melakukan pengamatan secara mendalam, wawancara berulang, serta interaksi yang cukup lama dengan informan di lapangan.⁶⁸

Melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja BKAD Kabupaten Pinrang, peneliti berupaya memahami konteks sosial dan budaya kerja yang berkaitan dengan penerapan efisiensi anggaran. Pengamatan terhadap aktivitas kerja, proses penganggaran, serta perilaku pegawai dalam melaksanakan efisiensi menjadi langkah penting untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dianggap kredibel karena diperoleh dari keterlibatan langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi penelitian.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dibandingkan dengan konteks lain yang memiliki situasi serupa. Untuk mencapai hal ini, peneliti memberikan deskripsi yang rinci mengenai latar belakang penelitian, karakteristik informan, serta situasi kerja di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang.

Deskripsi tersebut meliputi bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana penerapan efisiensi tersebut berdampak terhadap kinerja organisasi. Dengan memberikan uraian yang mendetail, diharapkan pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini relevan atau dapat dijadikan acuan bagi instansi lain yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas mengacu pada sejauh mana proses penelitian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan dapat ditelusuri. Penelitian ini memiliki

⁶⁸ Afiyanti, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif."

dependabilitas yang baik apabila peneliti lain yang mengikuti prosedur yang sama dapat memperoleh hasil yang relatif serupa.⁶⁹

Untuk menjaga dependabilitas, peneliti mencatat setiap tahap kegiatan penelitian secara teratur, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan. Seluruh catatan tersebut disusun dalam bentuk audit trail, yaitu kumpulan dokumen yang berisi catatan lapangan, transkrip wawancara, dan hasil analisis data. Dengan dokumentasi yang lengkap, proses penelitian ini dapat ditelusuri dan dievaluasi kembali oleh pihak lain bila diperlukan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan penelitian benar-benar bersumber dari data, bukan dari keinginan atau bias pribadi peneliti. Untuk menjaga konfirmabilitas, peneliti melakukan refleksi diri selama proses penelitian berlangsung, mencatat setiap pandangan, interpretasi, dan keputusan yang diambil selama proses analisis.⁷⁰

Selain itu, data hasil wawancara dan observasi juga dibandingkan dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja instansi. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan bukti empiris dan bukan semata interpretasi pribadi. Langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode untuk memperoleh data yang sama. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan

⁶⁹ Luthfiyani and Murhayati, “Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif.”

⁷⁰ Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif.”

hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁷¹

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, misalnya pegawai dari bagian anggaran, pendapatan, dan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Langkah ini bertujuan untuk melihat kesamaan pandangan, pengalaman, dan persepsi antarpegawai mengenai penerapan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan tugas mereka.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang diperoleh dari wawancara akan dicek kembali melalui observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan anggaran serta dokumen resmi seperti laporan keuangan atau laporan kinerja. Dengan cara ini, setiap data dapat diuji kebenarannya dari berbagai sisi sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena melalui proses inilah data yang telah dikumpulkan diolah, ditafsirkan, dan disusun menjadi temuan yang bermakna. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak peneliti berada di lapangan dan terus berlanjut hingga tahap akhir penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari data yang diperoleh serta memahami hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang.⁷²

⁷¹ Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif."

⁷² Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan menjadi informasi yang lebih bermakna. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi.⁷³

Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan disisihkan agar analisis lebih fokus. Melalui proses reduksi ini, peneliti berusaha mengidentifikasi tema-tema penting, seperti strategi efisiensi anggaran, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap produktivitas dan kinerja pegawai. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi, di mana data yang telah dipilih disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.⁷⁴ Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil wawancara, dan deskripsi hasil observasi. Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Misalnya, bagaimana penerapan efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat proses kerja, atau memperbaiki akuntabilitas laporan keuangan di BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penyajian data

⁷³ Mezmir, "Analisis Data Kualitatif: Tinjauan Mengenai Reduksi Data, Tampilan Data, Dan Interpretasi."

⁷⁴ Rofiah, "Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur."

menjadi dasar penting untuk memahami konteks dan menarik kesimpulan yang valid.

3. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hasil reduksi dan penyajian data untuk menemukan makna yang lebih mendalam dari fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berupa jawaban terhadap rumusan masalah, tetapi juga berupa pemahaman baru tentang bagaimana efisiensi anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.⁷⁵

Untuk memastikan kesimpulan yang diambil benar-benar valid, peneliti melakukan proses verifikasi secara terus-menerus dengan cara membandingkan temuan antar sumber data (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil interpretasi yang didukung oleh bukti empiris dan data yang kredibel.

⁷⁵ Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, BKAD dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kondisi adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, BKAD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Pinrang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih berdasarkan jabatan, tugas, serta keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Informan terdiri dari pihak internal yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran, serta pihak eksternal yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan efisiensi anggaran, dampaknya terhadap kinerja pegawai dan organisasi, serta penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun profil informan penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Profil Informan Internal

NAMA	JABATAN	TUGAS
Ma'dika, S.H., M.M	Kasubag Program	Bertugas menyusun program dan kegiatan, melakukan perencanaan dan evaluasi anggaran, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Andi Ardiansyah	Kepala Bidang Anggaran	Bertanggung jawab dalam penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan anggaran daerah serta memastikan penggunaan anggaran sesuai skala prioritas dan kebijakan pemerintah.
Hajerah Johan	Staff Bidang Anggaran	Membantu pelaksanaan administrasi dan pengelolaan anggaran, melakukan pengolahan data anggaran, serta mendukung proses penyusunan dan pelaporan anggaran daerah.

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2026.

Tabel 4.2 Profil Informan Eksternal

NAMA	STATUS	PERAN
Rusmiati	Staf Penelaah Teknis Kebijakan DPRD Kabupaten Pinrang	Berperan dalam melakukan telaah dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, memberikan masukan dan rekomendasi terkait efektivitas penggunaan anggaran, serta mengevaluasi realisasi anggaran bersama pemerintah daerah.

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2026.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu informan internal dan informan eksternal. Informan internal merupakan pihak yang berasal dari lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, informan eksternal berasal dari DPRD Kabupaten Pinrang yang berperan sebagai mitra pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Analisis penelitian difokuskan pada penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang, dampaknya terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian mencakup berbagai bentuk efisiensi yang dilakukan, perubahan pola kerja yang terjadi, faktor pendukung dan kendala pelaksanaan efisiensi, dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan kinerja organisasi, serta implementasi nilai amanah, keadilan, dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis sejauh mana efisiensi anggaran telah diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja BKAD Kabupaten Pinrang.

1. Penerapan Efisiensi Anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang

Penerapan efisiensi anggaran merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berfokus pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga mendorong setiap organisasi perangkat daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, BKAD Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah turut menerapkan berbagai bentuk efisiensi anggaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Penerapan efisiensi tersebut dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih selektif, penetapan skala prioritas, penghematan belanja operasional, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan di BKAD Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

informan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, terdapat beberapa tema yang menggambarkan penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang, yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk Penerapan Efisiensi Anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai bentuk-bentuk efisiensi anggaran yang diterapkan di BKAD Kabupaten Pinrang. Efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara lebih hemat, efektif, dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, BKAD Kabupaten Pinrang dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran yang harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak A. Ardiansyah menjelaskan bahwa:

“Sekarang ini, kemarin kita lakukan WFH atau kerja di rumah, kemudian belanja-belanja yang dianggap tidak penting seperti makan minum, kemudian ATK cetak itu dikurangi.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang diterapkan di BKAD Kabupaten Pinrang adalah pengurangan berbagai belanja operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak. Pengurangan tersebut meliputi biaya makan dan minum rapat, penggunaan alat tulis kantor (ATK), biaya pencetakan dokumen, serta penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA). Kebijakan ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa mengganggu pelaksanaan tugas utama organisasi.

Lebih lanjut, penerapan sistem WFA juga menjadi salah satu strategi efisiensi yang berdampak pada berkurangnya penggunaan fasilitas kantor seperti listrik, air, serta kebutuhan operasional lainnya. Dengan adanya

⁷⁶ Ardiansyah, “Wawancara Kepala Bidang Anggaran.” 25 Mei 2026

pengaturan pola kerja tersebut, penggunaan sumber daya dapat lebih terkendali sehingga anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada kebutuhan yang lebih prioritas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa:

“Bentuk efisiensi yang dilakukan antara lain mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan dokumen digital, menghemat penggunaan listrik dan air, membatasi pengadaan ATK, serta mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan melalui pengurangan belanja operasional, tetapi juga melalui perubahan pola kerja yang lebih efektif dan hemat. Pemanfaatan dokumen digital menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan kertas sekaligus mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, upaya penghematan listrik, air, serta pembatasan penggunaan alat tulis kantor menunjukkan adanya kesadaran untuk menggunakan fasilitas kantor secara lebih bijaksana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pengurangan belanja operasional yang dianggap kurang prioritas, pembatasan penggunaan alat tulis kantor dan biaya pencetakan dokumen, penghematan penggunaan listrik dan air, penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA), serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi.

b. Penetapan Skala Prioritas dalam Penggunaan Anggaran

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai bagaimana BKAD Kabupaten Pinrang menentukan prioritas penggunaan anggaran agar tetap efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Penetapan skala prioritas menjadi hal yang penting karena keterbatasan anggaran mengharuskan

⁷⁷ Hajerah Johan, “Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.” 25 Mei 2025

organisasi untuk memilih kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan target kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Di dalam pemerintahan itu ada namanya skala prioritas. Yang dianggap paling mendesak kita dahulukan, kemudian yang paling penting juga kita prioritaskan. Jadi kita berdasarkan kebutuhan yang paling penting dan yang sangat mendesak."⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak dilakukan secara merata pada seluruh kegiatan, melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi masing-masing program. Kegiatan yang dianggap paling penting dan mendesak akan menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran, Bapak A. Ardiansyah, yang menyatakan bahwa:

"Mengutamakan skala prioritas. Mengutamakan harus prioritas yang mana yang harus dipertahankan, yang mana yang tidak dipertahankan."⁷⁹

Menurut beliau, dalam kondisi efisiensi anggaran, setiap kegiatan harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah kegiatan tersebut benar-benar perlu dilaksanakan atau dapat dikurangi tanpa mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan juga menjelaskan bahwa:

"Prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling penting dan mendesak serta kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja organisasi."⁸⁰

⁷⁸ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

⁷⁹ Ardiansyah, "Wawancara Kepala Bidang Anggaran." 25 Mei 2026

⁸⁰ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan prioritas anggaran tidak hanya mempertimbangkan tingkat kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi kegiatan terhadap pencapaian target dan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BKAD Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip selektivitas dalam penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang diusulkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta keterkaitannya dengan target kinerja organisasi sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas menjadi salah satu strategi utama dalam penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Prioritas penggunaan anggaran ditentukan berdasarkan tingkat urgensi, kebutuhan organisasi, serta kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja.

c. Faktor Pendukung dan Kendala Penerapan Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, terdapat berbagai faktor yang mendukung keberhasilan penerapannya serta beberapa kendala yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Faktor pendukung dan kendala tersebut menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara optimal dalam lingkungan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Salah satunya itu bagaimana disiplinnya pegawai, termasuk juga kebijakan pimpinan. Termasuk bagaimana pimpinan merespons apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh personil yang ada."⁸¹

⁸¹ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan serta kedisiplinan pegawai dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dukungan dari seluruh unsur organisasi menjadi faktor penting agar pelaksanaan efisiensi dapat berjalan sesuai tujuan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan yang menyatakan bahwa:

"Faktor yang paling mendukung adalah komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta adanya aturan dan kebijakan yang jelas terkait efisiensi anggaran."⁸²

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa keberadaan regulasi yang jelas serta dukungan pimpinan menjadi landasan utama dalam penerapan efisiensi anggaran. Selain itu, kesadaran dan kedisiplinan pegawai juga berperan dalam memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Di sisi lain, pelaksanaan efisiensi anggaran juga menghadapi beberapa kendala. Bapak Ma'dika menjelaskan bahwa:

"Kendalanya itu tetap pada proporsional pelaksanaan pekerjaan yang harus kita lakukan dengan anggaran terbatas."⁸³

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak A. Ardiansyah, menyatakan bahwa:

"Kendalanya, ya kebiasaan."⁸⁴

Selain itu, Ibu Hajerah Johan juga menjelaskan bahwa:

"Kendalanya itu adanya keterbatasan anggaran untuk beberapa kegiatan yang membutuhkan biaya lebih besar, sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya."⁸⁵

⁸² Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei 2026

⁸³ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

⁸⁴ Ardiansyah, "Wawancara Kepala Bidang Anggaran." 25 Mei 2026

⁸⁵ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan efisiensi anggaran berasal dari keterbatasan anggaran yang tersedia serta perlunya penyesuaian terhadap kebiasaan kerja yang sebelumnya telah berlangsung. Pegawai dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sumber daya yang lebih terbatas tanpa mengurangi kualitas hasil kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang meliputi komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta adanya aturan dan kebijakan yang jelas. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, tuntutan pelaksanaan pekerjaan yang tetap harus berjalan optimal, serta perlunya penyesuaian terhadap pola dan kebiasaan kerja yang baru.

d. Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran

Selain melakukan penghematan dan penetapan skala prioritas, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang juga didukung oleh transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Ada inspektorat yang mereview, lalu ada BPK yang memeriksa pengelolaan anggaran yang ada di lingkungan kerja masing-masing SKPD."⁸⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga melalui pengawasan eksternal oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan

⁸⁶ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan yang menyatakan bahwa:

"Transparansi diterapkan melalui penyusunan laporan keuangan yang terbuka, pemeriksaan oleh atasan, Inspektorat, dan BPK, serta penggunaan sistem keuangan yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan."⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang terbuka serta penggunaan sistem keuangan yang mendukung proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya sistem tersebut, penggunaan anggaran dapat dipantau sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain dari pihak internal, pengawasan juga dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmiati selaku Staf Penelaah Teknis Kebijakan DPRD Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

"DPRD melakukan rapat dengan pihak OPD untuk mengevaluasi bagaimana realisasi anggaran. Misalnya realisasinya kurang, apa alasannya di situ DPRD pertanyakan."⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran melalui rapat evaluasi dan pembahasan realisasi anggaran bersama organisasi perangkat daerah. Melalui proses tersebut, DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

⁸⁷ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei 2026

⁸⁸ Rusmiati, "Wawancara Staff Penelaah Teknis Kebijakan DPRD." 9 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa transparansi dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui atasan langsung, Inspektorat, BPK, serta DPRD sehingga penggunaan anggaran dapat dikontrol dengan baik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang terbuka, penggunaan sistem keuangan yang dapat dipantau, pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD terhadap realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui berbagai langkah penghematan dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Bentuk efisiensi yang diterapkan meliputi pengurangan belanja operasional yang dianggap kurang prioritas, pembatasan penggunaan alat tulis kantor dan biaya pencetakan dokumen, penghematan penggunaan listrik dan air, penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA), serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi.

Selain itu, BKAD Kabupaten Pinrang menerapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran dengan memfokuskan alokasi anggaran pada kegiatan yang dianggap penting, mendesak, dan mendukung pencapaian target organisasi. Penerapan efisiensi anggaran juga didukung oleh komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta adanya aturan yang jelas, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan penyesuaian terhadap kebiasaan kerja yang baru.

Dalam pelaksanaannya, efisiensi anggaran turut didukung oleh transparansi dan pengawasan yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem keuangan yang terintegrasi, pemeriksaan oleh Inspektorat dan

BPK, serta pengawasan dari DPRD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga pada upaya meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, menjaga akuntabilitas, serta memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Dampak Penerapan Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai dan Kinerja Organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang

Penerapan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan efisiensi anggaran menuntut setiap pegawai untuk mampu bekerja secara lebih efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di BKAD Kabupaten Pinrang, diperoleh informasi bahwa penerapan efisiensi anggaran memberikan berbagai dampak baik terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi. Dampak tersebut terlihat dari perubahan pola kerja pegawai, kualitas pelayanan yang diberikan, serta efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memahami dampak tersebut secara lebih mendalam, peneliti mengelompokkan hasil wawancara ke dalam beberapa tema yang berkaitan dengan pengaruh efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi sebagai berikut:

a. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang. Kinerja pegawai merupakan salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh

kebijakan efisiensi anggaran karena adanya penyesuaian penggunaan sumber daya, perubahan pola kerja, serta pembatasan pada beberapa kegiatan operasional. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengalaman pegawai terhadap dampak kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Kalau efisiensi anggaran pada kinerja ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak. Artinya begini, walaupun ada efisiensi anggaran, tapi kinerja pegawai tetap kualitasnya sama dengan sebelumnya. Artinya karena tetap dilakukan pengawasan oleh pimpinan."⁸⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran tidak menyebabkan penurunan kualitas kinerja pegawai. Meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran dan perubahan pola kerja, pegawai tetap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menyatakan bahwa:

"Efisiensi anggaran mendorong pegawai untuk bekerja lebih efektif dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan."⁹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran justru mendorong pegawai untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil kerja yang diharapkan oleh organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran telah mendorong perubahan pola kerja pegawai menjadi

⁸⁹ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

⁹⁰ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei

lebih produktif dan terarah. Pegawai berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang terbatas melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan waktu yang lebih baik, serta penggunaan fasilitas kerja secara lebih efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berdampak negatif terhadap kinerja pegawai, melainkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak menurunkan kualitas kinerja pegawai. Sebaliknya, kebijakan tersebut mendorong pegawai untuk bekerja lebih efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta tetap menjaga kualitas pekerjaan meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

b. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kualitas dan Kecepatan Pelayanan

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah, BKAD dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan adanya penghematan pada beberapa aspek operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Kalau misalnya terkait dengan pelayanan ini, sekiranya hampir sama saja dengan sebelumnya. Kecuali mungkin ada pelayanan pada hari WFA itu agak terpengaruh, tetapi pada dasarnya untuk pelayanan umum tetap berjalan."⁹¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Pinrang tetap dapat dipertahankan meskipun kebijakan efisiensi anggaran telah diterapkan. Namun, adanya penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA) pada waktu tertentu dapat

⁹¹ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

memengaruhi kecepatan pelayanan karena jumlah pegawai yang bertugas di kantor menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak A. Ardiansyah yang menyatakan bahwa:

"Dari segi kualitas tidak ada yang berubah sih. Cuma memang karena adanya perubahan waktu kerja, pasti akan berdampak."⁹²

Beliau juga menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah pegawai yang bertugas secara langsung pada waktu tertentu dapat menyebabkan pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Meskipun demikian, pelayanan tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada.

Selain itu, Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan menjelaskan bahwa:

"Secara umum kualitas pelayanan tetap terjaga. Namun, dalam kondisi tertentu efisiensi dapat mempengaruhi kecepatan pelayanan sehingga diperlukan pengaturan kerja yang lebih baik."⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak secara langsung menurunkan kualitas pelayanan, tetapi lebih berpengaruh pada aspek kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pekerjaan yang baik agar pelayanan kepada pengguna layanan tetap berjalan secara optimal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Namun, kebijakan efisiensi dan perubahan pola kerja yang diterapkan dapat memengaruhi kecepatan pelayanan pada kondisi tertentu, terutama ketika jumlah pegawai yang bertugas secara langsung berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang

⁹² Ardiansyah, "Wawancara Kepala Bidang Anggaran." 25 Mei 2026

⁹³ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei

memberikan dampak terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, para informan menyatakan bahwa kualitas kinerja pegawai tetap dapat dipertahankan karena adanya pengawasan dari pimpinan serta kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Efisiensi anggaran justru mendorong pegawai untuk bekerja lebih efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dari aspek pelayanan, penerapan efisiensi anggaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Namun, dalam kondisi tertentu, kebijakan efisiensi seperti penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA) dapat memengaruhi kecepatan pelayanan karena adanya penyesuaian pola kerja pegawai. Meskipun demikian, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik melalui pengaturan kerja yang efektif dan koordinasi yang optimal antarpegawai.

Selain berdampak pada kinerja pegawai, efisiensi anggaran juga memberikan dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi menjadi lebih fokus dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, lebih selektif dalam penggunaan anggaran, serta lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi, melainkan mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga target organisasi tetap dapat dicapai dengan baik.

3. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kabupaten Pinrang

Prinsip akuntansi syariah merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan agar dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, adil, dan transparan. Meskipun BKAD Kabupaten Pinrang merupakan instansi pemerintah yang tidak secara khusus menerapkan sistem keuangan syariah, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip akuntansi syariah tetap dapat diterapkan

dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, diperoleh informasi bahwa beberapa prinsip akuntansi syariah telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Penerapan tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas, proses pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang.

Untuk memahami penerapan prinsip akuntansi syariah secara lebih mendalam, hasil wawancara dikelompokkan ke dalam beberapa tema sebagai berikut:

a. Penerapan Prinsip Amanah (Pertanggungjawaban)

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Dalam akuntansi syariah, amanah merupakan salah satu prinsip utama yang menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku."⁹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan harus memiliki dasar yang jelas serta didukung oleh dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa:

⁹⁴ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

"Dengan menggunakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta memastikan setiap pengeluaran memiliki bukti yang lengkap."⁹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, ketepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta kelengkapan dokumen pendukung setiap transaksi keuangan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta kelengkapan bukti pada setiap transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

b. Penerapan Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Dalam akuntansi syariah, kejujuran dan transparansi merupakan prinsip yang sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

"Laporan keuangan disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan."⁹⁶

⁹⁵ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei 2026

⁹⁶ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan secara jujur dan berdasarkan data yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi informasi keuangan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa:

"Nilai kejujuran dan keadilan dijaga dengan menyajikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, tidak memanipulasi laporan, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel."⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan transparansi diterapkan melalui penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya serta keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tidak melakukan manipulasi data, serta menerapkan keterbukaan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan.

c. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan mengharuskan setiap proses pengelolaan keuangan dilakukan secara proporsional, tidak memihak, dan sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa:

⁹⁷ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei 2026

"Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan tidak boleh digunakan di luar peruntukannya."⁹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga setiap program memperoleh alokasi anggaran yang proporsional.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa:

"Nilai kejujuran dan keadilan dijaga dengan menyajikan data sesuai kondisi yang sebenarnya serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel."⁹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diterapkan dalam penggunaan anggaran, tetapi juga dalam penyajian informasi keuangan yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya, pemberian alokasi anggaran secara proporsional, serta penyajian informasi keuangan secara objektif dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, diketahui bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Penerapan tersebut tercermin melalui pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Prinsip amanah diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta

⁹⁸ Ma'dika, "Wawancara Kassub Program." 8 Juni 2026

⁹⁹ Hajerah Johan, "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran." 25 Mei

kelengkapan bukti transaksi. Sementara itu, prinsip kejujuran dan transparansi diterapkan melalui penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya serta keterbukaan dalam proses pelaporan keuangan. Adapun prinsip keadilan diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta penyajian informasi keuangan secara objektif dan proporsional.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya berpedoman pada ketentuan administratif yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Pembahasan Penelitian

Kebijakan efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, meningkatnya tuntutan pelayanan publik, serta perlunya memastikan bahwa setiap belanja pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui kebijakan efisiensi, pemerintah tidak hanya menekankan penghematan belanja, tetapi juga mendorong pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas sehingga program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi tetap dapat terlaksana secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai regulasi, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Regulasi tersebut mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja melalui pengendalian pengeluaran yang

kurang prioritas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja, melainkan sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar menghasilkan kinerja yang lebih baik.¹⁰⁰

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan daerah, BKAD Kabupaten Pinrang turut melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran melalui berbagai penyesuaian dalam pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, dan penggunaan anggaran. Penerapan kebijakan tersebut tentu memberikan berbagai implikasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi, kinerja pegawai, serta tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan, tetapi juga menganalisis temuan penelitian berdasarkan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, serta menjelaskan penyebab, proses pelaksanaan, dampak, dan implikasi dari penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. Penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang

Penerapan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang optimal. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan terhadap kinerja organisasi, setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu mengelola anggaran secara hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan

¹⁰⁰ Zainal Said, Peci' Dan Transparansi Serta Akuntabilitas Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia, 2026.

pelayanan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *Value for Money* yang menekankan pentingnya aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik sehingga anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui berbagai upaya penghematan dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Bentuk efisiensi yang diterapkan antara lain pengurangan belanja operasional yang kurang prioritas, pembatasan penggunaan alat tulis kantor dan biaya pencetakan dokumen, penghematan penggunaan listrik dan air, penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA), serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Selain itu, BKAD Kabupaten Pinrang juga menerapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang dianggap penting dan mendukung pencapaian tujuan organisasi diberikan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, sedangkan kegiatan yang kurang mendesak disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Melalui penerapan skala prioritas tersebut, organisasi dapat mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang menjadi fokus utama tetap dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan efisiensi anggaran juga didukung oleh berbagai faktor, seperti komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta adanya sistem pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan internal maupun eksternal oleh Inspektorat, BPK, dan DPRD Kabupaten Pinrang. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan turut menjadi faktor yang mendukung keberhasilan

penerapan efisiensi anggaran karena setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri, Simatupang, Mauliza, dan Mariana yang menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan sumber daya yang lebih tepat sasaran.¹⁰¹ Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Salman dan Ikbal yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran dapat mengurangi pemborosan, memperkuat alokasi sumber daya, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.¹⁰²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya dipahami sebagai upaya penghematan anggaran, tetapi juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Berbagai langkah yang dilakukan, seperti penetapan skala prioritas, pemanfaatan teknologi digital, pengendalian belanja operasional, serta penguatan pengawasan penggunaan anggaran, menunjukkan adanya upaya untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip efisiensi dalam *Value for Money*, di mana organisasi berusaha memperoleh output yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian, penerapan efisiensi anggaran telah mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di BKAD Kabupaten Pinrang.

¹⁰¹ Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah.”

¹⁰² Salman and Ikbal, “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi.”

2. Dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang menurut persepsi dan pengalaman pegawai

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi merupakan aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor publik, penerapan efisiensi anggaran sering kali menimbulkan berbagai persepsi karena dapat memengaruhi pola kerja, penggunaan sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan organisasi perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Meskipun terdapat berbagai penyesuaian dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, pegawai tetap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital serta penyesuaian pola kerja yang lebih fleksibel membantu pegawai tetap produktif dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, komitmen dan tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diberikan menjadi faktor penting yang mendukung terjaganya kualitas kinerja selama kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

Dari sisi organisasi, penerapan efisiensi anggaran memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Organisasi menjadi lebih fokus dalam menentukan prioritas kegiatan dan penggunaan anggaran sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Melalui penetapan skala prioritas tersebut, kegiatan yang memiliki kontribusi besar

terhadap pencapaian tujuan organisasi tetap dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran yang harus dihadapi.

Selain berdampak pada pencapaian target organisasi, efisiensi anggaran juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pegawai menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan fasilitas kantor serta lebih memperhatikan kebutuhan dalam setiap penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku kerja pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran turut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih efektif dan produktif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marsselia dan Fitriasuri yang menunjukkan bahwa persepsi positif pegawai terhadap efisiensi anggaran dapat meningkatkan produktivitas, disiplin, dan akuntabilitas kerja.¹⁰³ Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Setiawan dan Ramdan yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui penggunaan sumber daya yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai maupun kinerja organisasi apabila diterapkan secara tepat dan didukung oleh seluruh unsur dalam organisasi.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dampak efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang cenderung memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, pegawai tetap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan organisasi tetap dapat mencapai

¹⁰³ Salsabil Marsselia, "Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan."

¹⁰⁴ Setiawan and Ramdan, "Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akun."

target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu menghambat kinerja, tetapi justru dapat menjadi sarana untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kedisiplinan kerja, serta memperkuat efektivitas dan akuntabilitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek administratif dan regulasi yang berlaku, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif akuntansi syariah, pengelolaan keuangan harus dilandasi oleh prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta menciptakan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى آتَاتِ الْأَمَّ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).¹⁰⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab serta keadilan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, amanah dapat diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

¹⁰⁵ *Al-Qur'an Al-Karim, QS. An-Nisa' [4]:58.*

penyusunan laporan keuangan yang jujur, serta keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap tanggung jawab yang diberikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap individu yang diberikan amanah akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, amanah tersebut diwujudkan melalui penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang benar, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip amanah telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang melalui penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta kelengkapan dokumen pendukung pada setiap transaksi keuangan. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti yang jelas sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab

¹⁰⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*.

dalam mengelola anggaran menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang.

Selain prinsip amanah, penerapan prinsip kejujuran dan transparansi juga terlihat dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. Informasi keuangan disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi data serta disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga setiap proses pengelolaan keuangan dapat diketahui dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya keterbukaan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan juga telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Setiap program dan kegiatan memperoleh alokasi anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan organisasi sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara proporsional. Penerapan prinsip keadilan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muslimin, Iksan, dkk. yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang didukung oleh sistem yang baik dan transparan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Fitri, Simatupang, Mauliza, dan Mariana yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang berorientasi pada efektivitas dan akuntabilitas mampu mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang lebih baik. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

transparansi, tanggung jawab, dan penggunaan anggaran yang tepat menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan prinsip akuntansi syariah di BKAD Kabupaten Pinrang telah tercermin melalui pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan administrasi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntansi syariah telah mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab di BKAD Kabupaten Pinrang.

¹⁰⁷ Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui berbagai langkah penghematan dan optimalisasi penggunaan sumber daya, seperti pembatasan belanja operasional yang kurang prioritas, penghematan penggunaan listrik dan air, pemanfaatan teknologi digital, penerapan sistem *Work From Anywhere* (WFA), serta penetapan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Penerapan efisiensi tersebut didukung oleh komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta sistem pengawasan yang melibatkan Inspektorat, BPK, dan DPRD Kabupaten Pinrang.
2. Penerapan efisiensi anggaran memberikan dampak yang relatif positif terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan perubahan pola kerja, kualitas kinerja pegawai tetap dapat dipertahankan melalui pengawasan pimpinan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, organisasi menjadi lebih fokus dalam menentukan prioritas kegiatan dan penggunaan anggaran sehingga target organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang tercermin melalui penerapan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan. Prinsip amanah diwujudkan melalui pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kelengkapan bukti transaksi, sedangkan prinsip kejujuran dan transparansi diterapkan melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun prinsip keadilan diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan

peruntukannya sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara akuntabel dan bertanggung jawab.

B. Saran

1. Bagi BKAD Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penerapan efisiensi anggaran dengan memperkuat pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan pengawasan internal, serta mempertahankan budaya kerja yang mendukung penggunaan sumber daya secara efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. BKAD Kabupaten Pinrang diharapkan dapat terus menjaga penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai efisiensi anggaran dan kinerja organisasi dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas atau pendekatan penelitian yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai penerapan efisiensi anggaran di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, 2014.

Afiyanti, Yati. "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," 2002.

Akbar, Dendy Syaiful, Irfan Faris Rudiana, Benny Prawiranegara, and Mira Aryanti. "Assessing the Effectiveness and Efficiency of the Public Service Budget." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 1 (2022).

Akhmad, Akhamad. "Analisis Implementasi Sistem Manajemen Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto." *Jurnal Ilmiah Administrasita'* 11, no. 2 (2021).

Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, n.d.

Al-Hakim, Yasmin, and Harnovinsah. "Penerapan Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran." *Prosiding Seminar Nasional Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi* 29, no. 2016 (2019).
<https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/snpmpt/article/view/7944>.

Andi Aliyyah Ramadhani Sam, Haliah Haliah, and Andi Kusumawati. "Pengungkapan Konsep Transparansi, Akuntabilitas, Dan Value for Money Dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis." *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)* 3, no. 1 (2024).

Andreas Wibowo, Erwin Sukandar, Bely Utarja, Eko Nur Surachman, Reni Fatimatuz Zahro. *Panduan Analisis Value For Money*.

Anelda Ultavia, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, Shaleh. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," 2021.

Ardiansyah, Andi. "Wawancara Kepala Bidang Anggaran," n.d.

Armstrong, M. *Performance Management* (2018).

Auditya, Lucy, Husaini Husaini, and Lismawati Lismawati. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Fairness* 3, no. 1 (2021).

Auliza Oktari, Agus Solikhin, Dahmiri. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Dengan Kompetensi Pegawai Sebagai Variabel Mediasi"(2024).

- Bili, Jenia Irin, and Susi Siswati. "Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-2022." *EQUILIBRIUM: Jurnal Bisnis & Akuntansi (EJBA)* XIX, no. 1 (2025).
- Cahyaningrum, Mailina, and Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi. "Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Di Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024," 2024.
- Darmawan, Muhamad, Muhammad Rifqy Addin Athalla, Onma Bryan Yehezkiel Hutasoit, Raihan Dwi Cahyadi, and Firman Lukman. "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi." *Journal of Social Contemplativa* 3, no. 1 (2025).
- Devinci Antasena, Yosefina Crisstin, Dalena Silawati devinciantasena@gmail.com. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1506>.
- Djazari, M. "Value for Money Audit Untuk Menilai Kinerja Lembaga Sektor Publik." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 8, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.21831/jpai.v8i1.941>.
- Ferlia, Tias Monika, Supami Wahyu Setyowati, Ati Retnasari, and Mochamad Fariz Irianto. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BKAD Kabupaten Malang)." *Jurnal Akuntansi Neraca* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>.
- Fitriyani, Ika, Muhammad Nur Fietroh, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, "Analisis Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa," 2021.
- Habibi, Habibi, Wikan Budi Utami, and Hadi Samanto. "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>.
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial , (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)".
- Hotimah, Khusnul, and Vitayanti Fattah. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal Daerah Kota Palu." *Journal of Economics and Management Sciences*, 2025. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>.

- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.
- Indonesia, Lembaran Negara Republik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/Pbi/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/Pbi/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, Dan Setelmen Dana Seketika (2014).
- Irfansyah Ahmad, Jumania Septariani. "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Pendekatan *Value For Money*" 32, no. 3 (2021).
- Johan, Hajerah. "Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran," n.d.
- John W Creswell, Cheryl N Poth, and Sugiyono. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Research Design*. Vol. 4, 2009.
- Kusuma, Rahmadhany Hadi, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. "Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kabupaten Gresik." *Journal of Management and Bussines (JOMB)* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115>.
- Lona, Sumartin Selfina, M E Perseveranda, and Henny A Manafe. "Analisis Ekonomis , Efisiensi Dan Efektivitas." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7 (2023): 879–89.
- Luky Kurniawan, Kurnia Warman, Azmi Fendri. "Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi." 2023. <https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>.
- Luthfiyani, Putri Wahidah, and Sri Murhayati. "Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif" 8 (2024).
- Ma'dika. "Wawancara Kassub Program," n.d.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health" 12, no. 33.
- Mezmir, Esubalew Aman. "Analisis Data Kualitatif: Tinjauan Mengenai Reduksi Data, Tampilan Data, Dan Interpretasi" 10, no. 21 (2020).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2021.
- Muhammad Khoirul Anam, Asmitiya Meilinda, Karina Atha Nabila. "Konsep Dan Teori Akuntansi Keuangan Syariah." *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2

(2024). <https://doi.org/10.24952/jaksya.v2i2.11348>.

- Muslimin, M Iksan, Yeni Ardiani Inka Nusamuda Pratama, Siti Rahmania, Hayauallah Anjani, Inang Sri Imara, Ainul Jeriyah, M Samunawardin, et al. "Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 9 (2025). <http://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/download/392/258>.
- Nasution, Yulia Kasih. "Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Pada Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2019." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 19, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.802>.
- Palupi, Dyah, Dassaad, Riyanti, and Budi Wahyudi. "Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019-2021." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 6, no. 3 (2022).
- Prameswari, Michelle, Rizki Ananda Safitri, Nok Karima, and Ade Gunawan. "Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik Dengan Pendekatan *Value for Money* Di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022)." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2014>.
- Priagung, Dimas Estu, Edward K. Sinoeraya, and Mafudi Mafudi. "Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara)." *Al-Tijary* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21093/at.v2i1.536>.
- Putri, Andita Cahyasari Pradana, and Fajar Syaiful Akbar. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 6, no. 2 (2022). <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1994>.
- Putri Novianti, Syaikhul Falah. "Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Ri Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bpkad Kabupaten Jayapura" 9 (2024).
- Putu Adi Erawan, Md Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiarta, I Putu Tedy Arya Wahyudi. "Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 3 (2018).
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data

- Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman” 1, no. 2 (2024): 77–84.
- R. U. Siahaan, Fachruzzaman. “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Kajian Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan, Ketaatan Peraturan Perundangan, Dan Efektivitas Pengendalian Intern.” 2019.
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif,” 1960.
- Rahman, Amni Zarkasyi, and Feri Lintang Saputra. “Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap.” *Humanika* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>.
- Ridwan, Mukminati, and Anggrawati. “Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur.” *Assets* 7, no. 1 (2017).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rofiah, Chusnul. “Analisis Data Kualitatif : Manual Data Analisis Prosedur”.
- Rusmiati. “Wawancara Staff Penelaah Teknis Kebijakan DPRD,” n.d.
- Said, Zainal. “‘Peci’ Dan Transparansi Serta Akuntabilitas Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia,” 2026.
- Salman, Salman, and Muhammad Ikbal. “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi.” *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99>.
- Salsabil Marsselia, Fitriasuri. “Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62017/jemb>.
- Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, Mariana Mariana. “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah.” (2024).
- Saputri, Sindi, Husnil Qatimah, Revo Fernando, and Rika Widianita. “Penerapan Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonsia Dalam Prespektif Prinsip Ekonomi Islam.” *Journal of Fiscal and Monemetary Studies* 1, no. 2 (2025).
- Sari, Dwi Nofita, Sri Mintarti, and Salmah Pattisahusiwa. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.” *Kinerja* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>.
- Setiawan, Djodi, and Kurnia Nur Ramdan. “Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akun.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan*

Ilmu Politik 8, no. September (2024).

- Silaban, Andrian Natanail, Tika Triana Lismono, and Erika Silaen. "Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta." *Jurnal Media Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024). <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/meb/article/view/3649/1780>.
- Silvida, Fitra Ria, and Muhammad Dzul Fadlli Fadlli. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i023>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Suliantoro, Irwan. "Menimbang Kembali Formula Efisiensi Pada Evaluasi Kinerja Anggaran." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i1.809>.
- Suridiyanti, Wayan Anggita, Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Departemen Akuntansi, and Universitas Hasanuddin. "Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money," no. October 2023 (2024). <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tumija, and Akhmad Zakky Ramadhan. "Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Affiliation." *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)* 10, no. 2 (2023). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/>.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Nirmayani
NIM : 2220203862202065
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
PRODI : Akuntansi Syariah
JUDUL : Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Pihak Internal (BKAD)

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang?
2. Bentuk efisiensi apa saja yang biasanya dilakukan dalam kegiatan kerja sehari-hari?
3. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan prioritas penggunaan anggaran agar tetap efektif?
4. Apakah ada perubahan pola kerja atau kebiasaan kerja setelah efisiensi anggaran diterapkan?

5. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran di BKAD?
6. Kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam menerapkan efisiensi anggaran?
7. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan penggunaan anggaran tetap hemat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan?
8. Bagaimana transparansi pengelolaan anggaran diterapkan di lingkungan kerja BKAD?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara memastikan anggaran benar-benar digunakan tepat sasaran?
10. Apakah penggunaan sistem digital atau aplikasi keuangan membantu meningkatkan efisiensi kerja? Mengapa?
11. Bagaimana efisiensi anggaran mempengaruhi kinerja pegawai di BKAD?
12. Apakah efisiensi anggaran berdampak pada kecepatan atau kualitas pelayanan keuangan daerah?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah efisiensi anggaran turut meningkatkan kinerja organisasi BKAD secara keseluruhan?
14. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran?
15. Bagaimana nilai kejujuran dan keadilan dijaga dalam proses pelaporan keuangan daerah?

B. Pedoman Wawancara untuk Pihak Eksternal (DPRD)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pinrang?
2. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya perubahan pengelolaan anggaran daerah dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana peran DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan efisiensi anggaran daerah?

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kinerja BKAD dalam pengelolaan keuangan daerah?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah efisiensi anggaran mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah?
6. Apakah pelaksanaan anggaran saat ini dinilai lebih hemat dan terarah dibanding sebelumnya?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah efisiensi anggaran berdampak terhadap kinerja organisasi pemerintah daerah secara umum?
8. Bagaimana pengaruh efisiensi anggaran terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah?
9. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah?
10. Apakah pengelolaan anggaran daerah saat ini sudah mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan bagi masyarakat?

Parepare, ...2026

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak
NIP. 199202032025212009

Surat Keterangan Pembimbing



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2658/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
- b. Menunjuk saudara: **Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : NIRMAYANI
- NIM : 2220203862202065
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGOLAHAN DATA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI KERJA
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 03 Juni 2025
Dekan.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax. 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NIRMAYANI
N I M : 2220203862202065
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGOLAHAN DATA
KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI KERJA

Telah diganti dengan judul baru:

DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PADA KINERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Perubahan Judul dilakukan berdasarkan saran dan arahan dari
dosen Pembimbing.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak

Mengetahui
Dekan,

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

Surat Pengantar Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1726/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2026

07 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NIRMAYANI
Tempat/Tgl. Lahir : BULU, 22 Mei 2003
NIM : 2220203862202065
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LINGK BULU, KELURAHAN MANARANG, KECAMATAN MATTIRO
BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PADA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0253/PENELITIAN/DPMTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-05-2026 atas nama NIRMAYANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0270/R/T.Teknis/DPMTSP/05/2026, Tanggal : 11-05-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0252/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2026, Tanggal : 11-05-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, KOTA PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : NIRMAYANI
 - 4. Judul Penelitian : DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PADA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI BPKPD KAB. PINRANG
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-11-2026.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Mei 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Bintang Nomor 01 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921658, Laman <http://pinrangkab.go.id>, Pos-el 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2 / 431 / BKAD / VI / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGURHAN, SE.Ak., MM
N I P : 19710812 200312 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pinrang

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : NIRMAYANI
NIM : 2220203862202065
Tempat/tanggal lahir : Bulu, 22 Mei 2003
Alamat : Mattiro Bulu Kab. Pinrang
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Telepon : 085 280 233 441

Telah melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang" dari Tanggal 11 Mei s/d 11 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 11 Juni 2026
Kepala Badan
AGURHAN, SE.Ak., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19710812 200312 1 001

Laporan Keuangan BKAD Kabupaten Pinrang

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1) Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.501.585.877.684,00 bertambah sebesar Rp. 63.509.086.354,00 sehingga menjadi Rp. 1.565.094.964.038,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.466.585.877.684,00
b. Bertambah	Rp.	38.141.721.722,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.504.727.599.406,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.501.585.877.684,00
b. Bertambah	Rp.	63.509.086.354,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.565.094.964.038,00
3. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	35.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	25.367.364.632,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.367.364.632,00

2) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	195.441.540.765,00
b. Bertambah	Rp.	10.320.990.152,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	205.762.530.917,00
2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	1.270.544.336.919,00
b. Bertambah	Rp.	27.820.731.570,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.298.365.068.489,00
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp.	600.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah lain- lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00

b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

1. Pajak Daerah ;		
a. Semula	Rp.	44.924.964.000,00
b. Bertambah	Rp.	2.750.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	47.674.964.000,00
2. Retribusi Daerah ;		
a. Semula	Rp.	3.932.359.000,00
b. Berkurang	Rp.	35.000.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.967.359.000,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan ;		
a. Semula	Rp.	10.545.217.765,00
b. Bertambah	Rp.	90.990.152,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	10.636.207.917,00
4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;		
a. Semula	Rp.	136.039.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	7.445.000.000,00
Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	143.484.000.000,00

c. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat		
a. Semula	Rp.	1.164.921.436.999,00
b. Bertambah	Rp.	10.215.115.407,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.175.136.552.406,00
2. Transfer Antar Daerah		
a. Semula	Rp.	105.622.899.920,00
b. Bertambah	Rp.	17.605.616.163,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	123.228.516.083,00

d. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari :

1. Pendapatan Hibah		
a. Semula	Rp.	600.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00

3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas ;

1. Belanja Pegawai ;

a. Semula	Rp.	606.293.453.599,00
b. Bertambah	Rp.	8.029.316.342,58
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	614.322.769.941,58

2. Belanja Barang dan Jasa ;

1) Semula	Rp.	433.522.802.492,00
2) Bertambah	Rp.	23.377.962.665,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	456.900.765.157,00

3. Belanja Hibah;

1) Semula	Rp.	96.919.530.144,00
2) Bertambah	Rp.	1.856.831.788,42
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	98.776.361.932,42

b . Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;

1) Semula	Rp.	48.184.884.462,00
2) Bertambah	Rp.	3.316.981.725,00
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	51.501.866.187,00

2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung ;

1) Semula	Rp.	103.903.025.577,00
2) Bertambah	Rp.	7.220.513.812,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	111.123.539.389,00

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1) Semula	Rp.	53.580.925.000,00
2) Bertambah	Rp.	17.430.254.900,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	71.011.179.900,00

4. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya;

1) Semula	Rp.	5.292.582.510,00
2) Bertambah	Rp.	439.363.620,00
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	5.731.946.130,00

5. Belanja Modal Asset Lainnya;		
1) Semula	Rp.	190.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	424.202.400,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	614.202.400,00
c. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, terdiri atas ;		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
d. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri atas;		
1. Belanja Bagi Hasil		
a. Semula	Rp.	4.885.732.300,00
b. Bertambah	Rp.	276.500.000,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	5.162.232.300,00
2. Belanja Bantuan Keuangan ;		
a. Semula	Rp.	144.312.941.600,00
b. Bertambah	Rp.	2.137.159.101,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	146.450.100.701,00
4) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :		
Pasal 5		
a. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas;		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	35.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	25.367.364.632,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	60.367.364.632,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas ;		
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
a. Semula	Rp.	35.000.000.000,00
b. Berkurang	Rp.	25.367.364.632,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	60.367.364.632,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas ;

a. Pembentukan Dana Cadangan

3) Semula	Rp.	0,00
4) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1) Semula	Rp.	1.494.222.777.758,00
2) Berkurang	Rp.	6.312.653.277,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp.	1.487.910.124.481,00
b. Belanja Daerah			
1) Semula		Rp.	1.543.098.395.408,00
2) Berkurang		Rp.	35.158.521.257,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp.	1.507.939.874.151,00
c. Pembiayaan Daerah			
a) Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula		Rp.	48.875.617.650,00
2) Berkurang		Rp.	28.845.867.980,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	20.029.749.670,00
2) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :			
Pasal 3			
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula		Rp.	234.768.302.342,00
2) Bertambah		Rp.	6.485.688.834,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.	228.282.613.508,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula		Rp.	1.259.454.475.416,00
2) Bertambah		Rp.	173.035.557,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp.	1.259.627.510.973,00
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula		Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang		Rp.	0,00
Jumlah lain- lain pendapatan yang sah setelah perubahan		Rp.	0,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kurung buka tutup (1) huruf a, bersumber dari :			
a. Pajak Daerah ;			
1) Semula		Rp.	85.861.596.425,00
2) Bertambah		Rp.	1.601.500.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp.	87.463.096.425,00
b. Restribusi Daerah ;			
1) Semula		Rp.	132.290.498.000,00
2) Bertambah/Berkurang		Rp.	8.750.000.000,00
Jumlah restribusi daerah setelah perubahan		Rp.	123.540.498.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan ;			
1) Semula		Rp.	10.636.207.917,00
2) Bertambah		Rp.	662.811.166,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	11.299.019.083,00
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;			
1) Semula	Rp.	5.980.000.000,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	5.980.000.000,00	
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kurung buka tutup (1) huruf b, bersumber dari :			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
1) Semula	Rp.	1.171.614.957.000,00	
2) Berkurang	Rp.	45.605.045.000,00	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.126.009.912.000,00	
b. Transfer Antar Daerah			
1) Semula	Rp.	87.839.518.416,00	
2) Bertambah	Rp.	45.778.080.557,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	133.617.598.973,00	
(4) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kurung buka tutup (1) huruf c, bersumber dari :			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00	
3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :			
Pasal 4			
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :			
(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas ;			
a. Belanja Pegawai ;			
1) Semula	Rp.	637.814.146.849,91	
2) Berkurang	Rp.	5.100.906.168,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	632.713.240.681,91	
b. Belanja Barang dan Jasa ;			
1) Semula	Rp.	485.978.923.704,00	
2) Berkurang	Rp.	49.244.773.025,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	436.734.150.679,00	
c. Belanja Subsidi ;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	

Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Belanja Hibah;			
1) Semula	Rp.	35.884.470.224,00	
2) Berkurang	Rp.	1.511.971.017,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	34.372.499.207,00	
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud, terdiri atas :			
1) Belanja Modal Tanah ;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/ Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	0,00	
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;			
1) Semula	Rp.	47.839.983.026,00	
2) Berkurang	Rp.	827.641.862,00	
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	47.012.341.164,00	
3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung ;			
1) Semula	Rp.	61.264.618.692,09	
2) Bertambah	Rp.	9.541.757.252,00	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	70.806.375.944,09	
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;			
1) Semula	Rp.	105.270.284.349,00	
2) Bertambah	Rp.	22.887.504.401,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	128.157.788.750,00	
5) Belanja Modal Asset Tetap Lainnya;			
1) Semula	Rp.	4.206.755.784,00	
2) Bertambah	Rp.	2.630.921.841,00	
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	6.837.677.625,00	
6) Belanja Modal Asset Lainnya;			
1) Semula	Rp.	360.226.000,00	
2) Bertambah	Rp.	140.950.000,00	
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	501.176.000,00	
(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud, terdiri atas ;			
1) Semula	Rp.	5.036.783.654,00	
2) Berkurang	Rp.	1.536.783.654,00	
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000,00	

(2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud, terdiri atas;

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	10.584.763.725,00
2) Berkurang	Rp.	10.584.763.725,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan ;

1) Semula	Rp.	148.857.439.400,00
2) Bertambah	Rp.	1.552.815.300,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	147.304.624.100,00

4) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas;

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	48.875.617.650,00
2) Berkurang	Rp.	28.845.867.980,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	20.029.749.670,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

7) Semula	Rp.	0,00
8) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3) Semula	Rp.	48.875.617.650,00
4) Berkurang	Rp.	28.845.867.980,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	20.029.749.670,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas ;

a. Pembentukan Dana Cadangan

3) Semula	Rp.	0,00
4) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Penyertaan Modal

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Daerah;



PEMERINTAHAN KAB. PINRANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4=(3/2)*100	5
PENDAPATAN	1.530.347.799.406,00	1.471.554.603.550,94	96,16	1.327.580.095.352,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.762.530.917,00	177.521.023.617,94	86,27	175.355.927.428,99
Pajak Daerah	47.674.954.000,00	48.253.309.623,00	101,21	45.821.473.681,00
Retribusi Daerah	3.967.359.000,00	3.250.702.960,00	81,94	3.438.279.971,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.636.207.917,00	10.636.207.917,00	100,00	10.545.217.765,00
Lain-lain PAD yang Sah	143.484.000.000,00	115.380.803.117,94	80,41	115.550.956.011,99
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	205.762.530.917,00	177.521.023.617,94	86,27	175.355.927.428,99
PENDAPATAN TRANSFER	1.298.365.068.489,00	1.265.773.575.728,00	97,49	1.152.167.058.023,82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	6.039.328.000,00	6.039.328.000,00	100,00	6.595.622.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.525.206.407,00	6.619.013.000,00	77,64	8.763.986.162,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	748.306.439.000,00	763.332.821.442,00	102,01	705.849.309.269,00
Dana Alokasi Khusus	328.522.604.000,00	326.428.525.944,00	99,36	240.098.506.247,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DANA PERIMBANGAN	1.091.393.577.407,00	1.102.419.688.386,00	101,01	961.307.423.678,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
D/D	0,00	0,00	0,00	16.484.913.000,00
Dana Desa	70.077.466.999,00	70.077.466.000,00	100,00	69.961.304.300,00
Insentif Fiskal	13.665.508.000,00	13.665.508.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	83.742.974.999,00	83.742.974.000,00	100,00	86.446.217.300,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.562.815.383,00	67.300.380.842,00	65,62	84.508.231.295,82
Bantuan Keuangan	20.665.700.700,00	12.310.532.500,00	59,57	19.905.185.750,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	20.665.700.700,00	12.310.532.500,00	59,57	19.905.185.750,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	123.228.516.083,00	79.610.913.342,00	64,60	104.413.417.045,82
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.298.365.068.489,00	1.265.773.575.728,00	97,49	1.152.167.058.023,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	26.220.200.000,00	26.220.200.000,00	100,00	57.109.900,00
Pendapatan Lainnya	0,00	2.039.804.205,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.220.200.000,00	28.260.004.205,00	107,78	57.109.900,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.530.347.799.406,00	1.471.554.603.550,94	96,16	1.327.580.095.352,81
BELANJA	1.590.715.164.038,00	1.511.916.158.512,00	95,05	1.339.365.736.928,00
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	614.322.878.211,58	593.373.082.756,00	96,59	564.499.860.920,00
Belanja Barang dan Jasa	456.935.815.887,00	437.218.054.478,00	95,68	390.205.988.943,00
Belanja Hibah	98.776.361.932,42	97.521.301.547,00	98,73	44.103.251.280,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.170.035.056.031,00	1.128.112.438.781,00	96,42	998.809.101.143,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.466.707.187,00	48.874.011.697,00	94,96	30.628.529.597,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.123.539.389,00	109.872.672.203,00	98,87	73.392.927.553,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.631.379.900,00	69.886.965.629,00	72,32	89.052.381.961,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.731.946.130,00	5.727.956.521,00	99,93	5.519.859.424,00
Belanja Modal Aset Lainnya	614.202.400,00	574.406.130,00	93,52	402.350.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	265.567.775.006,00	234.936.012.180,00	88,47	199.196.048.535,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.435.689.850,00	69,59	607.004.000,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.435.689.850,00	69,59	607.004.000,00
JUMLAH BELANJA	1.439.102.831.037,00	1.365.484.140.811,00	94,88	1.198.612.153.678,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4=(3/2)*100	5
TRANSFER				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.162.232.300,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	146.450.100.701,00	146.432.017.701,00	99,99	140.753.583.250,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	151.612.333.001,00	146.432.017.701,00	96,58	140.753.583.250,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.590.715.164.038,00	1.511.916.158.512,00	95,05	1.339.365.736.928,00
SURPLUS/DEFISIT	(60.367.364.632,00)	(40.361.554.961,06)	66,86	(11.785.641.575,19)
PEMBIAYAAN DAERAH	60.367.364.632,00	60.367.364.632,00	100,00	72.153.006.207,19
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	60.367.364.632,00	60.367.364.632,00	100,00	72.153.006.207,19
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.367.364.632,00	60.367.364.632,00	100,00	72.153.006.207,19
PEMBIAYAAN NETTO	60.367.364.632,00	60.367.364.632,00	100,00	72.153.006.207,19
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	20.005.809.670,94	0,00	60.367.364.632,00



A	B	C	D	E	F
	PEMERINTAHAN KAB. PINRANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2025 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025				
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.494.530.720.481,00	1.457.890.878.942,69	97,54	1.471.097.735.122,94
	JUMLAH PENDAPATAN	1.494.530.720.481,00	1.457.890.878.942,69	97,54	1.471.097.735.122,94
5	BELANJA DAERAH	1.514.560.470.151,00	1.455.711.710.258,00	96,11	1.511.435.350.084,00
	JUMLAH BELANJA	1.514.560.470.151,00	1.455.711.710.258,00	96,11	1.511.435.350.084,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20.029.749.670,00	20.036.275.227,94	100,03	60.367.364.632,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.029.749.670,00	20.036.275.227,94	100,03	60.367.364.632,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	22.215.443.912,63	0,00	20.029.749.670,94
Kab. Pinrang, 9 Juni 2026					
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
Agurhan, SE., Ak., MM					
NIP.197108122003121001					

Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Nirmayani lahir di Bulu pada tanggal 22 Mei 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Lawa dan Ibu Baralliang. Penulis memulai pendidikan formal di TK PGRI III Bulu, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 81 Mattiro Bulu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Pinrang dan kemudian di SMKN 3 Pinrang. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Parepare dan mengambil program studi Akuntansi Syariah. Penulis meyakini bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis menjadikan motto *“If You Never Try, You Never Know”* sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena keberhasilan berawal dari keberanian untuk mencoba. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, khususnya kepada dosen pembimbing, Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi. Dalam menyelesaikan studi, penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang”**